



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TANTANGAN BAGI MULTIKULTURALISME KONTEMPORER;  
SEBUAH STUDI ATAS PEMIKIRAN BHIKHU PAREKH**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana**

**Ezra Dwi Hadyanto  
0705160148**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI FILSAFAT**

**DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Ezra Dwi Hadyanto**

**NPM : 0705160148**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 19 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Ezra Dwi Hadyanto

NPM : 0705160148

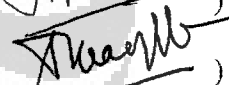
Program Studi : Filsafat

Judul Skripsi : Tantangan Bagi Multikulturalisme Kontemporer; Sebuah Studi Atas Pemikiran  
Bhikhu Parekh

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian  
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program  
Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Vincentia Irmayanti Meliono S.S., M.Hum. (  )

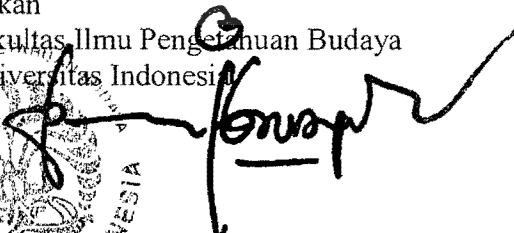
Penguji : Dr. Selu Margaretha Kushendrawati B.A., S.S, M. Hum. (  )

Penguji : Dr. Naupal S.S., M.Hum. (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 15 Juli 2011

oleh  
Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

  
Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A.  
NIP. 196510231990031002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan hikmat-Nya maka saya dimampukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih juga untuk semua pihak yang telah membantu saya, secara mental, intelektual, bahkan finansial sehingga tugas yang menentukan kelulusan saya ini akhirnya bisa dan layak diujikan.

Terimakasih untuk Bu Irmayanti yang sudah bersabar dengan meluangkan waktunya untuk mengarahkan saya menulis skripsi ini. Tanpa bimbingan Ibu, saya tidak akan bisa menulis karya ilmiah seperti ini. Maaf bu, hasilnya kurang maksimal. Terimakasih juga untuk Bu Margaretha dan Pak Naupal, tim penguji yang sudah mempertanyakan niat, tekad, dan modal saya untuk menjadi seorang sarjana. Terimakasih banyak untuk Bapak/ Ibu sekalian.

Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih untuk staf-staf mahalum dan subbag kemahasiswaan. Maaf setiap tahun saya merepotkan dengan mengurus keringanan biaya pendidikan berikut dendanya. Bapak/ Ibu sekalian sabar sekali mengurus administrasi saya...

Yang terbaik yang pernah dan masih saya miliki, sahabat-sahabat yang selalu setia membantu, mulai diskusi yang penting sampai yang tidak ada hubungannya dengan masa depan. Dimas, Oky, Iben, Safin, Ega, Iyan, thanks brooo! My sweet little sister, Ranies, I can't wait to see you and say, I MADE IT! Cipiwaaa..., kamu selalu dukung aku setiap aku mulai bimbang bisa selesai dari kuliah ini. Thank u for supporting me all the time!

Mama, Papa, adikku Vini, mas sudah selesai kuliah. Maaf membuat kalian menunggu lama untuk sampai pada momen ini. Selanjutnya, mas akan menapaki jalan yang lebih panjang, untuk masa depan kita bersama.

I LOVE YOU ALL!!!

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ezra Dwi Hadyanto  
NPM : 0705160148  
Program Studi : Filsafat  
Departemen : Filsafat  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tantangan Bagi Multikulturalisme Kontemporer; Sebuah Studi Atas Pemikiran Bhikhu Parekh

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 18 Juli 2011

Yang menyatakan

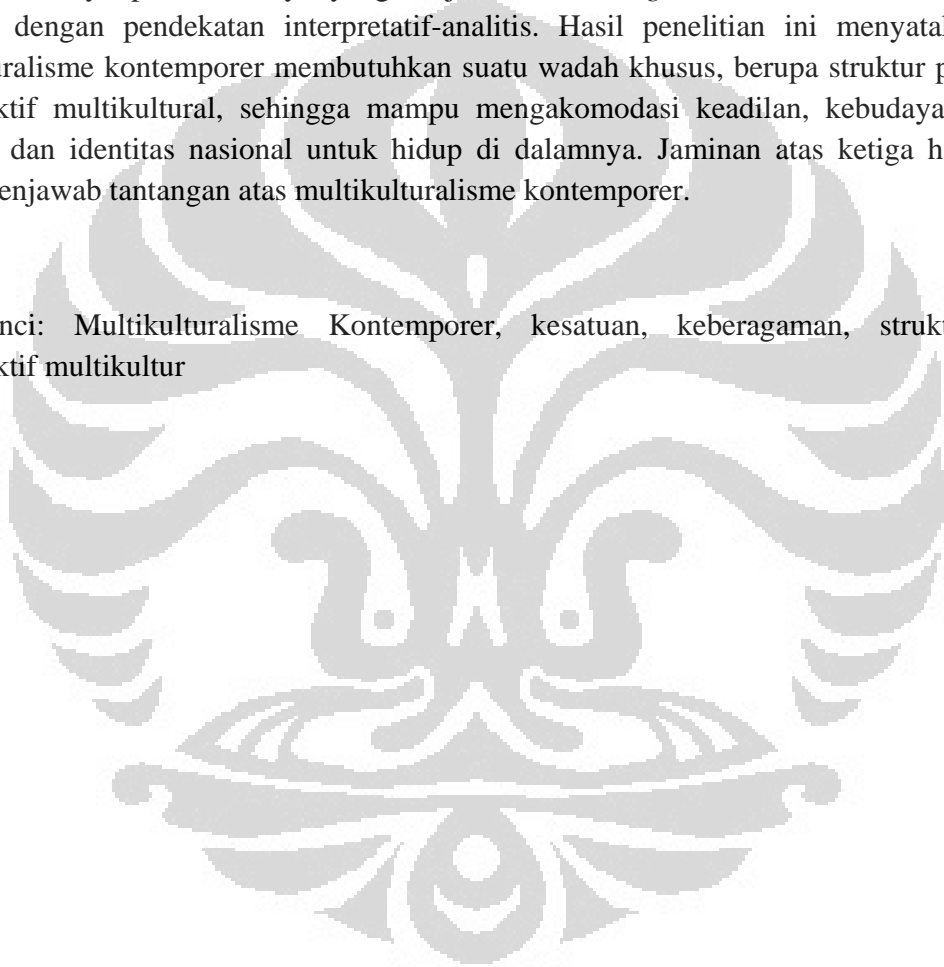
(Ezra Dwi Hadyanto)

## ABSTRAK

Nama : Ezra Dwi Hadyanto  
Program Studi : Filsafat  
Judul : *Tantangan Bagi Multikulturalisme Kontemporer; Sebuah Studi Atas Pemikiran Bhikhu Parekh*

Skripsi ini membahas tantangan tersendiri yang ada pada multikulturalisme kontemporer dan bagaimana mengatasinya, dengan menjabarkan penelitian yang dilakukan atas pemikiran Bhikhu Parekh, khususnya pada bukunya yang berjudul *Rethinking Multiculturalism*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan interpretatif-analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa multikulturalisme kontemporer membutuhkan suatu wadah khusus, berupa struktur politik yang berperspektif multikultural, sehingga mampu mengakomodasi keadilan, kebudayaan kolektif majemuk, dan identitas nasional untuk hidup di dalamnya. Jaminan atas ketiga hal ini yang mampu menjawab tantangan atas multikulturalisme kontemporer.

Kata Kunci: Multikulturalisme Kontemporer, kesatuan, keberagaman, struktur politik berperspektif multikultur



## ABSTRACT

Name : Ezra Dwi Hadyanto  
Study Program : Philosophy  
Title : *Challenge to Contemporary Multiculturalism: A Study to Bhikhu Parekh Thought*

The focus of this literate study is the challenge to contemporary multiculturalism and how to face it, by reporting the research that author did to Bhikhu Parekh thought, especially in *Rethinking Multiculturalism*. This research is analytic-descriptive research. The result of this research is contemporary multiculturalism need its own bowl, a political structure with multicultural perspective. This is the very beginning step to accommodate justice, collective culture, and national identity to rise together. The guarantee of these three important things is the answer to the challenge.

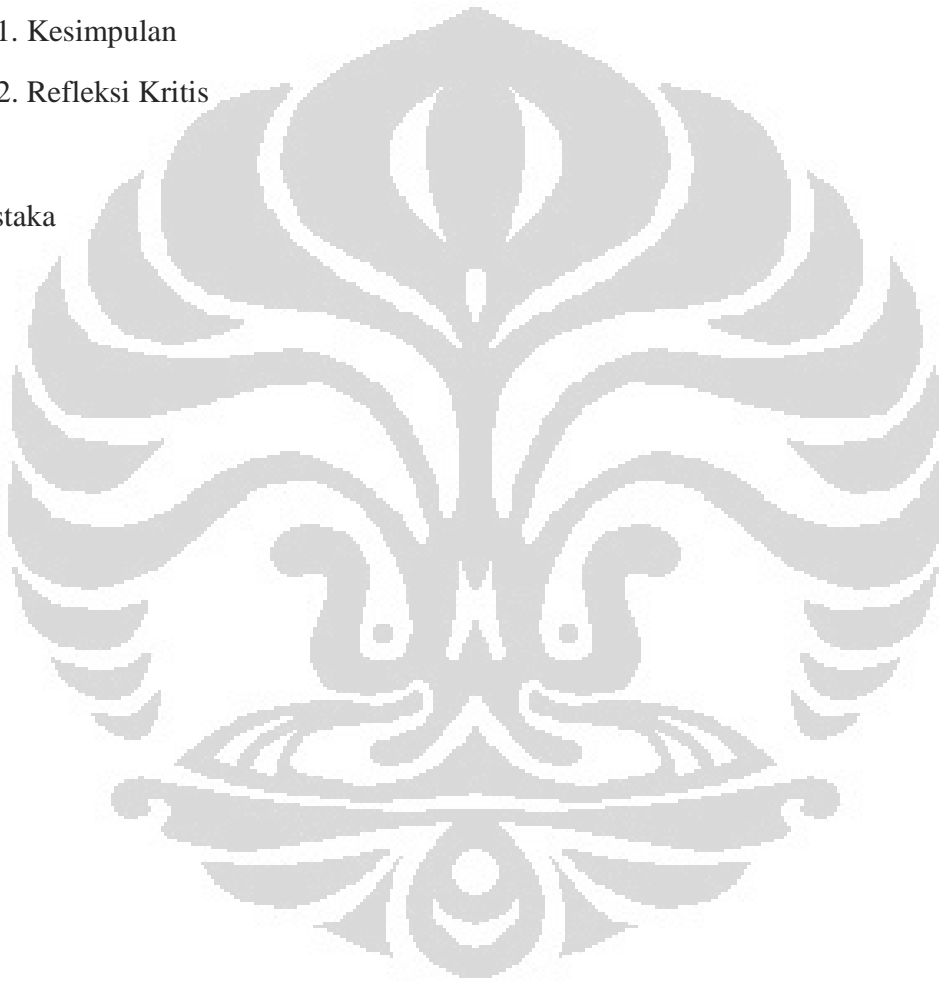
Key word: Contemporary Multiculturalism, unity, diversity, political structure based on multicultural

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	2
I.3. Pernyataan Tesis	4
I.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
I.5. Metode Penelitian	4
I.6. Kerangka Teori dan Konsep	5
I.7. Sistematika Penulisan	11
<b>II. BERKENALAN DENGAN BHIKHU PAREKH</b>	<b>12</b>
II.1. Riwayat Hidup Bhikhu Parekh	12
II.2. Karya-karya Bhikhu Parekh	15
II.3. Historisitas Pemikiran Bhikhu Parekh	15
<b>III. MULTIKULTURALISME KONTEMPORER DALAM PANDANGAN BHIKHU PAREKH</b>	<b>26</b>
III.1. Multikulturalisme, Batasan dan Perkembangannya	26
III.1.1. Batasan Multikulturalisme	26
1.2. Perkembangan Multikulturalisme	28
III.2. Tuntutan dalam Multikulturalisme Kontemporer	32

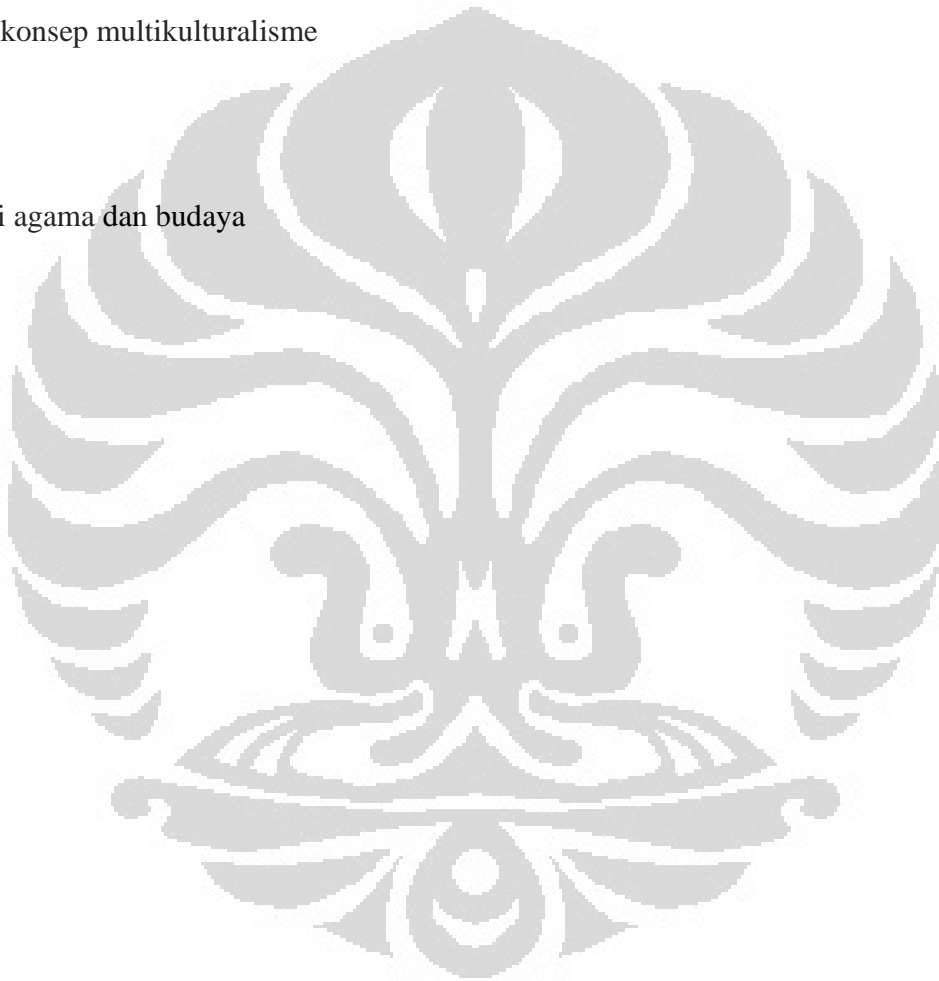


2.1. Kebutuhan Masyarakat Multikultural Kontemporer	32
III.2.2. Memahami Keberagaman Kultural dalam Multikulturalisme Kontemporer	34
<b>IV. STRUKTUR POLITIK BAGI MUTIKULTURALISME KONTEMPORER</b>	<b>47</b>
IV.1. Bentuk-bentuk Integrasi Politik	47
IV.2. Prinsip-prinsip Pembentukan Struktur Politik Multikultural	52
<b>V. PENUTUP</b>	<b>59</b>
V.1. Kesimpulan	59
V.2. Refleksi Kritis	60
Daftar Pustaka	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	8
Peta historisitas pemikiran Bhikhu Parekh	
Gambar 2	10
Kerangka konsep multikulturalisme	
Gambar 3	37
Peta posisi agama dan budaya	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. LATAR BELAKANG

Kehidupan dalam keberagaman di dunia ini sedang memasuki fase yang bergolak dalam keberadaannya, menghadapi ancaman di satu sisi dan mendapat pacuan di lain sisi. Terancam dalam arti mendapat banyak tantangan, sekaligus terpacu karena semakin banyak pembahasan akan perlunya mempertahankan keberagaman di tengah masyarakat. Tantangan yang dimaksud muncul dari berbagai kondisi faktual, seperti masih adanya universalisme nilai yang dipaksakan dalam masyarakat, kekhawatiran akan adanya pertentangan kepentingan, hingga globalisasi pun meningkatkan rasa curiga saat memandang pada perbedaan (Parekh, 2008a: hal 22).

Tidak jarang di beberapa belahan dunia, tantangan yang disebut di atas justru berhasil membunuh usaha pemeliharaan terhadap keberagaman itu sendiri. Jerman, pada 16 Oktober 2010, telah resmi mengumumkan hancurnya multikulturalisme dan selesainya semua usaha untuk mengembangkannya di negara itu. Hal ini disampaikan Kanselir Angela Merkel saat pertemuan dengan para pemuda Partai Uni Demokrat Kristen (CDU), partai yang membawa Merkel menjadi penguasa<sup>1</sup>. Merkel kemudian menekankan pentingnya integrasi bagi semua imigran, untuk menyelamatkan *ke-Jerman-an* bangsanya dengan mengajarkan kebudayaan Jerman pada semua pendatang.

Proses pemaksaan penerapan suatu budaya nasional pada masyarakat dengan budaya asal lain seperti ini tidak satu-satunya di dunia. Perancis menerapkan asimilasi di negaranya. Sementara Inggris, Switzerland, Kanada, dan negara-negara Eropa lainnya tidak kalah bermasalahnya dengan keberagaman dalam negara mereka. Kondisi ini menunjukkan betapa besarnya kecemasan dalam masyarakat dunia akan pendatang dan budaya yang mereka bawa. Kecemasan tersebut muncul karena ketakutan akan tergesernya nilai-nilai yang mereka yakini selama ini dengan nilai baru yg dibawa oleh imigran-imigran itu. Titik terjauhnya, terjadi suatu pemaksaan nilai hidup secara kultural kepada para pendatang. Nilai yang terbaik untuk ‘kita.’

---

<sup>1</sup> Dikutip dari KOMPAS.com, 18 Oktober 2010: *Multikulturalisme Telah Gagal di Jerman*

Saat satu atau beberapa komunitas meyakini kebenarannya dan tahap berikutnya meuniversalkan kebenaran itu, ada suatu fase yang terabaikan, yaitu fase untuk melihat, memahami, dan memberi tempat untuk kemudian membuka diri terhadap perbedaan. Masyarakat yang memasuki fase universalitas semu tersebut meminggirkan kesetaraan yang ada antar sesama warga negara dalam demokrasi. Lebih lanjutnya, mereka kemudian meminggirkan hak untuk menjadi diri sendiri yang melekat pada setiap umat manusia yang berbudaya<sup>2</sup>.

Dalam kondisi seperti ini, dialog antar budaya diperlukan untuk menyingkirkan kecemasan akan perbedaan dan rasa curiga atas yang berbeda (Parekh, 1999). Globalisasi sebenarnya membuka ruang untuk proses dialektik ini, karena globalisasi memberi kesempatan pada semua pihak untuk memunculkan diri. Probleminya adalah, globalisasi pada sisi yang sama juga mendukung adanya homogenitas dengan menyajikan satu pemenang atas ide, intelektualitas, moral, dan kehidupan sosial. Homogenitas ini menjadi jebakan yang menunggu di ujung proses dialektik antar budaya.

Keberadaan perbedaan itu sendiri bermasalah di dalam dirinya. Perbedaan yang ada antar lini membuat gesekan-gesekan rentan terjadi. Klimaksnya, perbedaan bisa membawa pada perpecahan dan disintegrasi bangsa. Kondisi seperti ini perlu dipelajari untuk kemudian diantisipasi.

Bhikhu Parekh hadir sebagai seorang pemikir dengan latar belakang pluralitas yang begitu kuat di India. Terilhami dengan pola pikir Gandhi, Parekh kemudian berusaha menyelamatkan semua masyarakat kultural dalam persatuan melalui perspektif multikultural. Pemikiran Parekh ini yang kemudian menginspirasi penulis untuk menggunakannya sebagai bahan kajian filosofis pada tulisan ini.

## **I.2. RUMUSAN MASALAH**

Pembahasan mengenai multikulturalisme Bhikhu Parekh memiliki tinjauan yang sangat luas, meliputi filsafat politik, budaya, problem identitas, hingga permasalahan

---

<sup>2</sup> Amy Gutman, pada pengantar atas buku Charleys Taylor, *Examining the Politics of Recognition*. 1994

sosial. Untuk tulisan ini, penulis akan membahas bagaimana Parekh memandang masyarakat multikultural seharusnya menghadapi tantangan di masa kontemporer, yaitu mewujudkan keberagaman sekaligus kesatuan. Pembahasan ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan aspek-aspek utama dari pemikiran Parekh.

Tahap pertama adalah kondisi masyarakat multikultural kontemporer. Pada tahap ini Parekh menjelaskan bahwa masyarakat yang multikultural bukanlah suatu fenomena yang baru, namun telah ada sebelumnya dan terus mengalami perkembangan dari masa pramodern, modern, hingga kontemporer.

Tahap kedua adalah tuntutan dalam multikulturalisme kontemporer. Parekh menekankan bahwa kondisi masyarakat multikultural pada masa kontemporer memilikiuntutannya sendiri, yaitu jaminan pemberian tempat sekaligus akan keberagaman dan kesatuan.

Tahap ketiga adalah tantangan dalam multikulturalisme kontemporer. Dengan berusaha menjawab tuntutan yang ada dalam masyarakat multikultural kontemporer, multikulturalisme menghadapi tantangannya sendiri, yaitu bagaimana mewujudkan suatu struktur politik yang mampu menampung keberagaman dan kesatuan sekaligus.

Tahapan-tahapan yang telah disebutkan di atas kemudian dirumuskan menjadi beberapa permasalahan utama yang akan dijawab dalam tulisan ini. Permasalahan pertama adalah bagaimana Bhikhu Parekh memandang multikulturalisme pada masa kontemporer. Jawaban atas pertanyaan ini akan lebih berfokus pada pemikiran-pemikiran Bhikhu Parekh yang membedakan multikulturalisme pada setiap jaman.

Berkaitan dengan pertanyaan pertama di atas, maka pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah bagaimana proses penyatuan tahap-tahap tersebut, yaitu kesatuan dan keberagaman, dalam struktur politik yang berperspektif multikulturalisme kontemporer.

Melalui penelitian ini, penulis berusaha menggunakan pemikiran Bhikhu Parekh untuk menjawab persoalan bagaimana kesatuan bisa memberi tempat untuk keberagaman tumbuh di dalamnya, dan bagaimana keberagaman bisa tetap membuka akses menuju kesatuan, dengan menciptakan suatu struktur politik yang mampu menampung keduanya.

### **I.3. PERNYATAAN TESIS**

Multikulturalisme kontemporer memerlukan suatu struktur politik tertentu untuk menjawab tuntutan bagi dirinya, yaitu mewujudkan kesatuan dan keberagaman sekaligus dalam masyarakat multikultural.

### **I.4. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami konsep multikulturalisme dalam bingkai kontemporer
2. Melihat, memahami, untuk kemudian dimungkinkan mengambil sikap atas tantangan yang ada pada multikulturalisme kontemporer
3. Melihat hubungan atau interaksi antara keberagaman dan kesatuan dalam masyarakat multikultural
4. Menemukan cara atau proses yang tepat untuk mewujudkan masyarakat yang multikulturalis pada masa kontemporer dengan merumuskan struktur politiknya

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi pada studi filsafat yang bertitik tolak pada pemikiran Bhikhu Parekh mengenai kesatuan dan keberagaman pada multikulturalisme kontemporer
2. Memberikan landasan berpikir kepada masyarakat tentang pentingnya kesatuan dan keberagaman dalam masyarakat multikultural

### **I. 5. METODE PENELITIAN**

Sebagai sebuah penelitian filsafat, metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran literatur kepustakaan dari tema yang akan dibicarakan. Dalam metode ini penulis menggunakan dua kategori rujukan data, yakni data primer dan data sekunder.

Data primer secara langsung berisi konsep-konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya yang dihasilkan Bhikhu Parekh. Data sekunder merupakan karya-karya lain serta situs dari website yang membahas pemikiran Bhikhu Parekh.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan analisis-interpretatif yang mencoba memaparkan bagaimana multikulturalisme menurut pandangan Bhikhu Parekh. Pemaparan akan difokuskan pada konsep keberagaman dan kesatuan. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis kritis-refleksif bagaimana Parekh berusaha mewujudkan keduanya melalui perumusan struktur politik baru yang mengacu pada multikulturalisme.

## **I.6. KERANGKA TEORI DAN KONSEP**

Multikulturalisme secara umum diartikan sebagai suatu keyakinan, kebijakan, atau program yang tidak hanya mempromosikan pluralisme sebagai hal yang positif, tetapi juga menghadirkan pengakuan dan penghargaan atas perbedaan etnis dan kultural dalam ranah publik, untuk kemudian menyokong keberadaan identitas kultural yang terpisah dalam satu negara yang tunggal ( Bromell, 2008. hal 9).

Dari definisi tersebut, penulis berusaha menelaah konsep Bhikhu Parekh akan multikulturalisme kontemporer beserta tantangannya, dengan menggunakan beberapa teori dari pemikir lain sebagai acuan.

### **1. Charles Taylor**

Konsep-konsep yang dikemukakan Charles Taylor sebagai seorang pemikir filsafat politik, terutama politik pengakuan identitas, mempengaruhi alam pikiran Parekh dalam usahanya merumuskan suatu jalan keluar atas diskriminasi kultural.

Ada tiga pokok pikiran dari Taylor yang digunakan penulis untuk menguraikan inti pemikiran Parekh. Pokok pikiran yang pertama adalah aspirasi dasar manusia sebagai kebutuhan untuk berhubungan dengan, atau dalam hubungan dengan, apa yang kita lihat sebagai kebaikan (Taylor, 1989, hal. 42). Konsekuensinya, kita harus menyadari adanya pluralitas dari kebaikan, dan konflik yang muncul dari kondisi ini,

dan tidak menutup konflik ini dengan melarang salah satu diantaranya (Taylor, 1989, hal. 518).

Pokok pikiran Taylor yang kedua adalah bahwa setiap orang memiliki hak (dan tanggung jawab) untuk mengembangkan kehidupan mereka sendiri, dengan dasar apa yang mereka putuskan penting atau bernilai bagi hidup mereka (Taylor, 1991, hal.14). Hal ini memberi landasan politis bagi setiap orang untuk memperjuangkan pilihan atas hidupnya, termasuk pilihan untuk hidup dengan mengembangkan budayanya.

Pokok pikiran Taylor yang terakhir adalah pandangannya akan kesetaraan martabat. Kesatuan memungkinkan adanya kesetaraan martabat, akan tetapi bahwa martabat itu sendiri adalah setara sangatlah esensial terhadap kesatuan tujuan itu sendiri (Taylor, 1994, hal. 49).

## 2. Mahatma Gandhi

Gandhi memberikan kontribusi yang besar terhadap pemikiran Parekh tentang kehidupan sosial dalam keberagaman. Beberapa gagasan Gandhi yang diwujudkan melalui sikapnya dalam menghadapi kemajemukan, memberi contoh pada Parekh remaja bagaimana seharusnya hidup menyikapi perbedaan.

Gagasan Gandhi yang pertama adalah bahwa semua orang seharusnya memiliki kebebasan tanpa mempermasalahkan perbedaan seseorang dari yang lain. Gagasan yang kedua adalah tidak ada seorang pun diantara kita yang telah menemukan kebenaran absolut. Yang ada hanya kebenaran pada posisi kita. Dari kedua gagasan ini, muncul pemikiran bahwa kita perlu membentuk kesatuan untuk bisa saling memenuhi kebenaran-kebenaran yang parsial tersebut.

Kemudian, gagasan Gandhi yang terakhir adalah bahwa semua manusia sama pentingnya, tidak seharusnya ada diskriminasi dalam relasi sosio-kultural.

Setelah menarik beberapa gagasan dari kedua pemikir diatas, penulis akan masuk ke inti pemikiran dari Bhikhu Parekh, yang kemudian menjadi kajian utama dari pembahasan akan multikulturalisme kontemporer. Beberapa teori Parekh yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

1. Perspektif multikultural (Parekh, 2008a. Hal 440)



Parekh mengemukakan beberapa gagasan yang membangun perspektif multikultural, yaitu: (1) Manusia adalah makhluk yang tertanam secara kultural; (2) Budaya yang berbeda merepresentasikan sistem makna dan visi yang berbeda tentang hidup yang baik; (3) Setiap budaya adalah plural dalam dirinya dan merefleksikan dialog berkelanjutan antara tradisi-tradisinya yang beragam dengan setiap pemikiran.

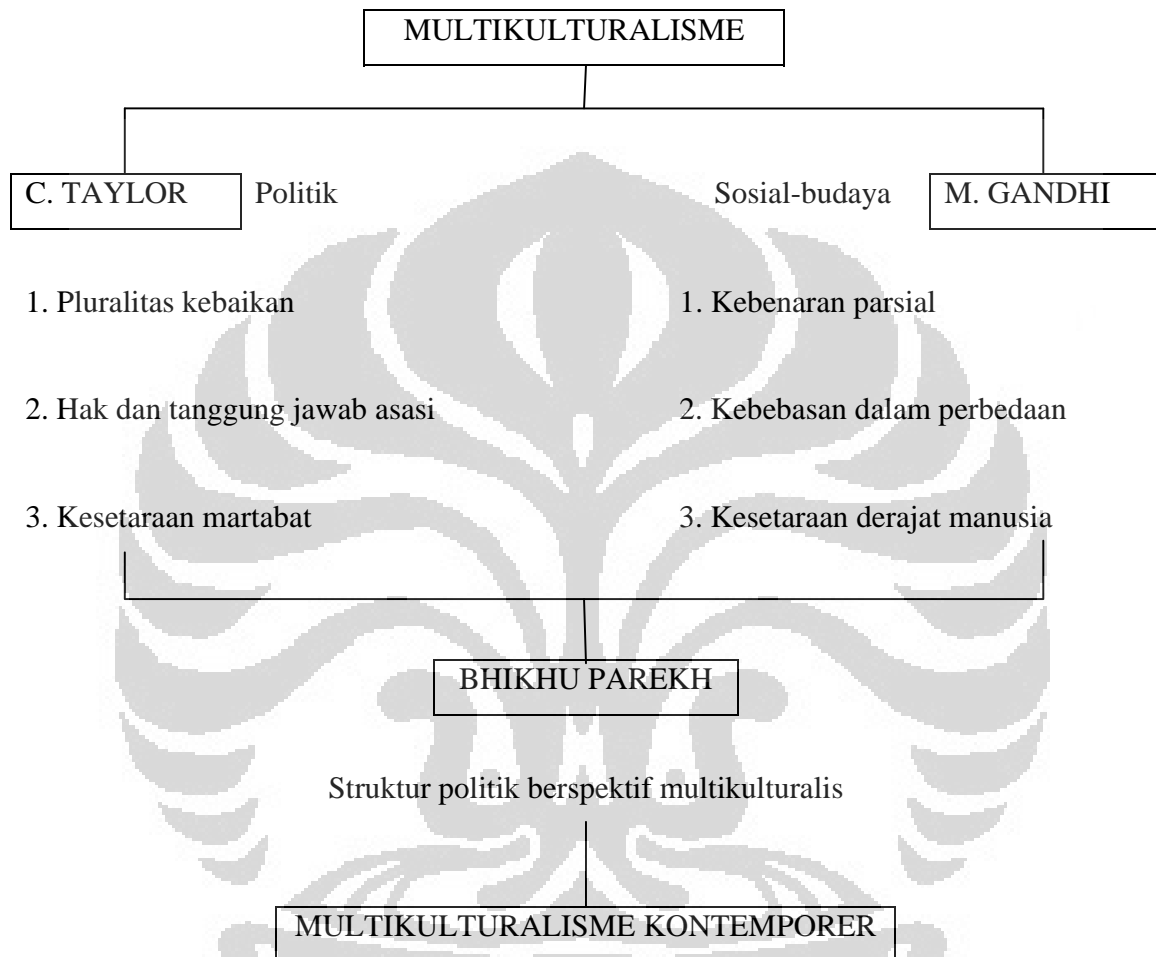
## 2. Prinsip masyarakat multikultural<sup>3</sup>

Menurut Parekh, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan masyarakat yang multikultural untuk menjadi komunitas yang multikulturalis, yaitu: (1) Kesatuan dan keberagaman sama pentingnya sehingga keduanya saling membatasi; (2) Komunitas multikultural mengangkat keberagaman bukan untuk mengancam persatuan. Oleh karena itu, dibutuhkan rasa kebersamaan antar anggotanya. (3) Pengakuan publik terhadap suatu budaya harus diikuti juga dengan pengakuan politik yang terkomunikasikan dan terlembagakan.

---

<sup>3</sup> Bhikhu Parekh dalam resumennya, *A Commitment to Pluralism*

Secara umum, penjabaran pemikiran tokoh-tokoh tersebut dipetakan sebagai berikut:



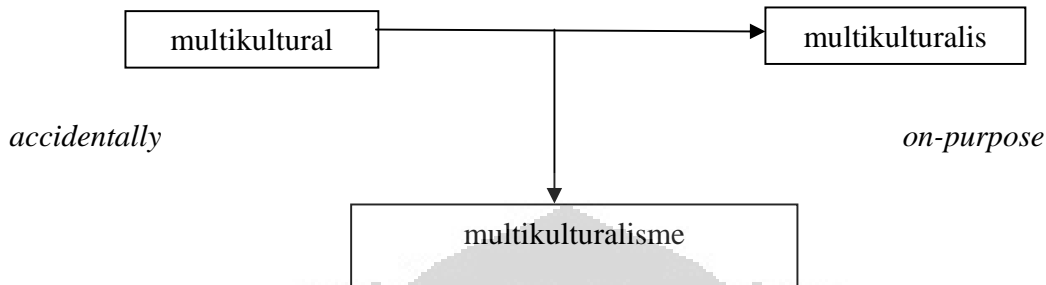
*Gambar 1*

*Peta Historisitas Pemikiran Bhikhu Parekh*

Penulisan skripsi ini juga dilakukan dengan penggunaan beberapa konsep tentang keberagaman budaya, yang dirasa perlu diperjelas oleh penulis untuk menerangkan penggunaannya dalam teks. Konsep-konsep tersebut adalah:

- **Multikultur** : padanan kata yang terdiri atas kata multi dan kultur, yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan beberapa budaya berbeda dalam satu wadah tertentu, baik institusi maupun paradigm.
- **Multikultural** : kata sifat (*adjective*) yang menunjukkan adanya pertemuan beberapa budaya berbeda dalam satu wadah tertentu. Penggunaan kata ini didahului oleh kata benda (*nomina*) tertentu, yaitu wadah pertemuan budaya-budaya berbeda yang dimaksud. Contoh: negara multikultural, bangsa yang multikultural, perspektif multikultural
- **Multikulturalis** : berbeda dengan multikultural yang menunjukkan kondisi empirik dari adanya beberapa budaya berbeda yang bertemu dalam satu wadah, multikulturalis merupakan padanan kata sifat (*adjective*) yang penggunaannya mensyaratkan adanya kesadaran tertentu. Kesadaran yang dimaksud adalah adanya keinginan dan kesepakatan dari setiap unsur di dalamnya untuk hidup bersama dalam perbedaan budaya tersebut. Dengan kata lain, pertemuan antar budaya berbeda yang terjadi disini, telah melalui suatu proses pemahaman terlebih dahulu.
- **Multikulturalisme** : multikulturalisme adalah suatu pandangan yang memberikan pemahaman pada setiap individu dalam komunitas-komunitas budaya, untuk kemudian memunculkan kesadaran untuk hidup bersama dalam keberagaman tersebut. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah pemahaman yang memungkinkan sebuah wadah yang multikultural menuju multikulturalis.
- **Multikulturalitas** : sebuah tingkatan atau persentase yang menunjukkan tingkat kompleksitas keberagaman dalam suatu wadah. Istilah ini digunakan dalam perbandingan antara suatu wadah multikultural yang satu dengan yang lain. Contoh: multikulturalitas di India lebih tinggi 9isbanding multikuluturalitas di Swiss.

Kerangka konsep yang digunakan pada skripsi digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2**  
**Kerangka konsep multikulturalisme**

Multi-kultur adalah kondisi alami, yang menyatakan bahwa pada posisi itu ada banyak budaya bertemu. Multikultural merupakan suatu kondisi situasional pada suatu masyarakat yang mempertemukan beberapa budaya. Kondisi ini terjadi begitu saja (*accidentally*). Sementara itu, multikulturalis merupakan kondisi suatu masyarakat yang menghendaki untuk hidup bersama di dalam keberagaman, dengan menjadikan kondisi tersebut sebagai suatu hal yang dituju bersama-sama (*on-purpose*). Pada tahap ini, multikulturalisme sebagai pandangan akan keberagaman dalam budaya menjadi suatu prasyarat bagi masyarakat yang multikultur menuju masyarakat yang multikulturalis. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Parekh dalam *Rethinking Multiculturalism*, bahwa multikultural mengacu pada kenyataan akan keanekaragaman kultural, sedangkan istilah multikulturalisme mengacu pada sebuah tanggapan normatif atas fakta tersebut (Parekh, 2008, hal. 20).

## **I.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan makalah ini secara sistematis ditulis dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa subbab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang membahas latar belakang permasalahan dengan kerangka teoritisnya, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, pernyataan tesis, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi biografi Bhikhu Parekh sebagai tokoh pemikir dalam tulisan monograf ini, kemudian historisitas intelektual yang membahas beberapa pemikir yang mempengaruhi pemikiran Bhikhu Parekh.

Bab tiga adalah eksplorasi deskriptif tentang konsep multikulturalisme Bhikhu Parekh. Eksplorasi ini disusun sesuai dengan kajian tulisan ini, yaitu dialektika kebudayaan, dan kesatuan dalam keberagaman.

Bab empat berisi analisis-interpretatif dari pemikiran Bhikhu Parekh tentang bagaimana seharusnya struktur politik yang mungkin mewujudkan multikulturalisme kontemporer di dalamnya.

Bab lima merupakan penutup dari seluruh skripsi ini, mulai dari bab pertama sampai bab empat. Selain kesimpulan, bab ini juga akan dilengkapi dengan refleksi kritis dari penulis.

## **BAB II**

### **BERKENALAN DENGAN BHIKHU PAREKH**

Pada BAB II ini akan dijelaskan riwayat hidup Bhikhu Parekh, karya-karya yang pernah dihasilkannya, serta historisitas pemikirannya, berupa beberapa pemikiran yang mempengaruhi pemikirannya sendiri saat ini.

#### **II.1. RIWAYAT HIDUP**

Bhikhu Parekh adalah seorang pemikir dan pemerhati permasalahan politik dan sosial. Dia lahir pada tahun 1935 di Amalsad, Gujarat, India. Ayahnya bekerja sebagai penambang emas. Dia tinggal bersama dengan 22 orang kerabat keluarganya—yang berasal dari keluarga menengah—dalam satu rumah. Keluarganya memperlakukan dia dengan penuh kasih sayang, walaupun sama seperti keluarga lainnya, dia juga mengalami pergulatan dalam kehidupan keluarga.<sup>4</sup>

Terlahir di tengah masyarakat yang terdiri atas berbagai sekte Hindu dan Muslim, Parekh kecil telah terbiasa dengan kehidupan yang multikultural dan multi-agama. Selain itu, masyarakat tempat dia dibesarkan merupakan masyarakat yang memperlakukan setiap anggotanya dengan memandang kasta. Hal ini menjadi modal awalnya untuk memberi perhatian pada keadilan sosial.<sup>5</sup>

Pada masa itu, bagi orang-orang dari kalangan menengah bawah pada umumnya, Mohandas Karamchand Gandhi menjadi tokoh yang memberi inspirasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Peristiwa penembakan Gandhi pada 30 Januari 1948 membuat banyak orang terhenyak dan kehidupan dalam kedamaian anti kekerasan pun terancam.<sup>6</sup> Parekh

---

<sup>4</sup> <http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storyCode=159231&sectioncode=26>

<sup>5</sup> [http://www.essex.ac.uk/honorary\\_graduates/or/2003/bhikhu-parekh-oration.aspx](http://www.essex.ac.uk/honorary_graduates/or/2003/bhikhu-parekh-oration.aspx)

<sup>6</sup> Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih dikenal dengan Mahatma Gandhi meninggal setelah ditembak oleh Nathuram Ghotse pada 30 Januari 1948, saat sedang berjalan kaki di New Delhi. Pelaku pembunuhan memiliki hubungan erat dengan pergerakan Hindu garis keras di India.

yang memasuki masa remajanya pada saat itu ikut terhenyak atas kejadian ini, kejadian yang memberi pengaruh besar pada pemikiran dan perjuangannya di kemudian hari.

Parekh merupakan orang pertama di keluarganya yang masuk perguruan tinggi. Ia kemudian meraih gelar sarjananya pada tahun 1954, dan kemudian gelar magister pada tahun 1956 dari universitas yang sama, yaitu Bombay University, dengan bidang peminatan politik. Parekh kemudian menikah dengan Pramila Dalal. pernikahannya ini ditentang oleh kakek dari Pramila, karena mereka memiliki latar belakang kasta lebih tinggi dari Parekh. Sekali lagi, Parekh dihadapkan pada permasalahan relasi sosial budaya, sesuatu yang kemudian dihancurkannya dengan memilih untuk menikah dalam pelarian.

Salah seorang pengajarnya kemudian menyarankan ia untuk melanjutkan studi akademiknya di London School of Economics. Pada bulan Oktober 1959, Parekh bersama istrinya mendarat di Britania, yang sekarang menjadi Inggris. Sebelum tiba di London, Parekh tidak memiliki kecemasan akan adanya diskriminasi ras di Inggris. Sejarah bahwa bangsa Inggris pernah menduduki India membuatnya berpikir bahwa walaupun berbeda, kedua negara ini bersahabat. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Pada saat ia dan istrinya mencari tempat penginapan, cerita pun berubah.

*“The windows had little notices saying blacks and Indians should not apply. If you telephoned in response to an advert, they will recognize your accent and say the place had gone.”*

*(<http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storyCode=159231&sectionCode=26>)*

Dia kemudian tidak menanggapi ini dengan memendam kepahitan terhadap mereka. Parekh memproyeksikan kesadaran akan kasta dalam masyarakat Inggris, dan kemudian mengartikulasikannya ke dalam bahasa warna – putih superior, hitam inferior. Kewaspadaannya akan ketidakadilan muncul saat dia menyadari bahwa tidak ada yang berubah sampai ada yang memulai untuk memperjuangkan kesetaraan. Hal inilah yang kemudian menghantui pikirannya saat melanjutkan kuliahnya di London School of Economics.

Di perguruan ini, ia dikenalkan dengan tokoh-tokoh seperti Bertrand Russell, Amartya Sen, Anthony Giddens, bahkan Karl Popper, sebagai senior dan beberapa diantaranya sebagai pengajar. Parekh kemudian meraih gelar doktoralnya pada tahun 1966, dengan memfokuskan penelitiannya pada Jeremy Bentham dan utilitarian, sebuah disertasi tentang gagasan kesetaraan dalam pemikiran politik Inggris.

Setelah menyelesaikan studinya, Parekh mengajar di London School of Economics, University of Glasgow, dan kemudian mengajar di University of Hull, tempat yang menjadikannya Professor Teori Politik pada tahun 1982. Selain itu, Parekh juga dikenal sebagai seorang intelektual di tiga benua. Dia pernah menjadi profesor pada University of British Columbia, Concordia University dan McGill University di Montreal, Harvard University, Institute of Advanced Studies di Vienna, University of Pompeu Febra in Barcelona, University of Pennsylvania, dan juga di Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Paris. Saat ini dia sedang menjadi profesor di LSE dan profesor filsafat politik pada University of Westminster.

Bhikhu Parekh telah menerima banyak penghargaan atas karirnya. Beberapa diantaranya adalah British Asian of the Year (1992), Penghargaan Atas Pengabdian Seumur Hidup untuk Asia dari BBC (1999), Sir Isaiah Berlin Prize atas kontribusi seumur hidup kepada filsafat politik oleh Political Studies Association (2002); the Distinguished Global Thinker Award oleh India International Centre Delhi (2006); dan the Interdependence Prize dari The Campaign for Democracy (2006).

Selain penghargaan-penghargaan tersebut di atas, Parekh mendapat kehormatan dengan menjadi wakil ketua dari Commission for Racial Equality, pada tahun 1985-1990. Ia juga diangkat sebagai anggota dari House of Lords<sup>7</sup> pada tahun 2000. Dengan menjadi anggota dari The House of Lords, Parekh dapat masuk ke arena publik, berpartisipasi dalam debat, dan " ...saying things from public space that I can expect people to hear and perhaps be influenced by."<sup>8</sup>

## II.2. KARYA-KARYA BHIKHU PAREKH

Berikut ini adalah beberapa buku dan jurnal yang pernah dihasilkan Bhikhu Parekh sepanjang karirnya:

1. Hannah Arendt and The Search for a New Political Philosophy (1981)
2. Marx's Theory of Ideology (1982a)
3. Contemporary Political Thinkers (1982b)

---

<sup>7</sup> **House of Lords** (Dewan Bangsawan) adalah sebutan bagi majelis tinggi dalam Parlemen Kerajaan Bersatu Britania Raya. Monarki Inggris bersama majelis tinggi (House of Lords) dan majelis rendah **House of Commons** (Dewan Rakyat Britania Raya) membentuk Parlemen Kerajaan Bersatu. Sekarang ini, jumlah kursi House of Lords (731) melebihi jumlah kursi House of Commons (646).

<sup>8</sup> (<http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storyCode=159231&sectioncode=26>)



4. Gandhi's Political Philosophy (1989)
5. Liberalism and Colonialism (1995a)
6. Rushdie's Affair (1995b)
7. Minority Practices and Principles of Toleration (1996)
8. Dilemmas of a Multicultural Theory of Citizenship (1997a)
9. Managing Multicultural Societies (1997b)
10. Common Citizenship in a Multicultural Society (1999a)
11. What is Multiculturalism? (1999b)
12. Rethinking Multiculturalism (2000)
13. The Future of Multi-ethnic Britain (2001a)
14. Gandhi; A Very Short Introduction (2001b)
15. Rethinking Multiculturalism 2<sup>nd</sup> edition (2006)
16. A New Politics of Identity (2008)

### **II.3. HISTORISITAS PEMIKIRAN BHIKHU PAREKH**

Ada banyak orang yang mempengaruhi pemikiran Bhikhu Parekh, tentang filsafat politik secara umum maupun multikulturalisme secara khusus. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pengaruh yang didapat Parekh dari dua orang tokoh, yaitu Mahatma Gandhi dan Charles Taylor. Mahatma Gandhi adalah tokoh yang mewarnai masa remaja Parekh di India, sedangkan Taylor adalah salah seorang rekan diskusi Parekh di Inggris, seorang kawan untuk bertukar pikiran tentang bagaimana memandang keberagaman dari sudut pandang filsafat politik. Dengan melakukan penelusuran pemikiran ini, kita akan menemukan dari mana **ketiga aspek** dalam pemikiran Parekh, yaitu **keberagaman, kesatuan, dan struktur politik berperspektif multikulturalisme kontemporer**, ditemukan untuk kemudian dimunculkan. Tokoh pertama yang akan dikupas penulis adalah Mahatma Gandhi.

## 1. Mahatma Gandhi

Seperti kita ketahui bersama, masa remaja Parekh diwarnai dengan keberagaman budaya agama di India. Satu peristiwa yang terjadi saat itu, yang kemudian sangat mempengaruhi dirinya di kemudian hari adalah peristiwa penembakan Mahatma Gandhi, pada 30 Januari 1948. Parekh yang saat itu berusia 15 tahun begitu terhenyak akan kejadian ini. Baginya, Gandhi adalah orang yang sangat berkontribusi bagi perjuangan negaranya menuju kemerdekaan ( Parekh, 2001b, hal. 111).

Gandhi memberi inspirasi banyak orang melalui pemikirannya tentang bagaimana seharusnya sebuah negara yang menampung keberagaman di dalamnya. George Paxton<sup>9</sup> mengatakan dalam tulisannya *What Would a Gandhian Society Look Like*, bahwa ada hal-hal yang harus diwujudkan dalam sebuah negara ideal yang dibentuk atas pemikiran Gandhi, yaitu: (a) toleransi atas keberagaman; (b) sistem ekonomi yang berkeadilan; (c) kepedulian nyata atas alam; dan (d) konsep baru atas pembelaan diri.

Toleransi atas keberagaman begitu penting bagi Gandhi untuk meningkatkan ketertarikan dan penerimaan terhadap perbedaan dari setiap elemen budaya yang berbeda satu sama lain. Saat sikap intoleran muncul, maka penerimaan pluralisme pada saat yang sama juga menyempit. Sedangkan dalam sistem ekonomi yang berkeadilan, Gandhi mengemukakan idenya yang disebut dengan *Trusteeship*, yaitu bahwa mereka yang sudah mapan mempergunakan kesejahteraannya tidak hanya untuk kepentingannya sendiri. Kepemilikan pribadi dibatasi hanya untuk hal-hal kecil.

Hal berikutnya yang harus diwujudkan adalah kepedulian nyata atas alam. Gandhi meyakini bahwa bagaimana kita memperlakukan alam, akan berdampak bagi kesehatan kita, termasuk didalamnya bagaimana kita menjalani gaya hidup yang sehat. Terakhir, Gandhi menekankan pentingnya pembelaan diri dengan menghindari kekerasan. Keberanian itu tetap harus dimiliki untuk melakukan perlawanan, akan tetapi perlawanan dengan menghindari kekerasan pun tetap dimungkinkan untuk dilakukan. Yang terpenting adalah menghindari kekerasan harus menjadi prinsip

---

<sup>9</sup> Paxton adalah editor dari buku *The Gandhi Way* sekaligus kontributor dari Gandhi Foundation

dasar kita terlebih dahulu. Selanjutnya, tinggal bagaimana kita mengembangkan metode yang didasari oleh prinsip ini.

Penempatan toleransi atas keberagaman pada posisi awal menggambarkan sebagai mana pentingnya hal ini menurut Gandhi. Mary Ann Sellars, seorang peraih penghargaan *The Special Honours and Awards* dari Southern Illinois University, mengafirmasi hal ini. Dalam makalahnya yang berjudul *Gandhi: A Vision for a New World Order*, Sellars mengatakan bahwa Gandhi adalah orang yang menempatkan perdamaian pada tempat utama, tanpa kekerasan, mengarah pada kebenaran, dan toleransi antar agama sebagai titik tujuan. Kepedulian Gandhi pada kemanusiaan menjadi bukti keyakinannya bahwa semua manusia adalah setara, sama pentingnya, tidak peduli bagaimana kelas, kasta, ras, agama, ataupun jenis kelamin.

Sellars kemudian mengutip dalam buku *Gandhi in India, In His Own Words*, tentang bagaimana Gandhi memandang perbedaan dan keberagaman persepsi antar umat manusia.

*How can we expect perfection from an imperfect being? A blind man has collected a band of other blind folk. But the blind man knows that he is blind, and also knows the cure for his blindness. Hence, though living with blind people, he is confident that he will not lead them into a pit, nor will he himself fall into it. He walks with the stick before taking every step. And, therefore, things have gone well on the whole so far. If, despite his using the stick, the blind man has occasionally strayed from the path, he has immediately realized his error and retraced his steps back to his co-workers. So long as my blindness remains, even a person like you who loves me will continue to have reasons to criticize me. When the blindness has disappeared, there will be no such grounds for criticism. Meanwhile, let all of us, blind men and women, who are seekers after truth, describe the elephant as we perceive it. Our descriptions will vary, but each will be perfectly true from the person's limited point of view. After all, every one of us will have but touched the elephant. When our eyes open all of us will dance with joy and shout: 'How blind we were! This is an elephant, about which we had read in the Git<sup>a</sup>. How fortunate it would have been if our eyes had opened earlier.'*

Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana Gandhi memandang bahwa kita berbeda karena kita semua memang belum tahu bagaimana kebenaran yang seutuhnya. Tidak ada yang salah, hanya saja masing-masing memiliki kebenaran pada posisinya. Saat kebenaran yang seutuhnya terkuak, maka tidak ada lagi perbedaan dan keberagaman. Oleh karena itu, sebagai orang yang sama-sama

mencari dan menuju pada kebenaran, sudah seharusnya kita saling mendukung satu sama lain.

Menurut Sellars, dalam tulisannya *Gandhi: A Vision of A new World Order* yang mengutip ulang kutipan Green atas buku Gandhi yang berjudul *Statement to the Press*, Gandhi memandang kebenaran memerlukan beberapa hal, termasuk diantaranya keinginan untuk menentang norma-norma sosial yang salah. Pada masa itu, sasaran utama Gandhi adalah sistem kasta yang menurutnya sangat menyiksa rakyat, menjerumuskan rakyat lebih jauh pada kemiskinan. Impiannya adalah melihat semua orang memiliki kebebasan tanpa memandang perbedaan dirinya dari yang lain.

Kebebasan dalam keberagaman ini juga digaris bawahi oleh Parekh. Hanya orang bebas, yaitu orang yang mampu membuat putusan atas dirinya sendiri, yang mampu untuk mengembangkan kebenaran ontologis atas dirinya. Kebebasan kemudian menjadi dasar dan prakondisi yang diperlukan untuk bisa menjadi diri sendiri. Menentang kebebasan seseorang berarti memaksa seseorang untuk hidup berdasarkan kebenaran orang lain (Parekh, 2001b, hal 117). **Kebebasan dalam keberagaman** ini adalah impian yang kemudian berusaha diwujudkan Parekh, sebagai **aspek pertama** dalam pemikirannya, dengan mengusahakan **terjaganya keberagaman dalam setiap usaha pembebasan hak-hak manusia**.

*My Hinduism is not sectarian. It includes all that I know to be best in Islam, Christianity, Buddhism and Zoroastrianism. I approach politics as everything else in a religious spirit. Truth is my religion and ahimsa is the only way of its realization.*<sup>10</sup>

Dari kutipan di atas, terlihat jelas bagaimana Gandhi memberi tempat yang begitu besar pada pluralitas dan toleransi dalam segala area pemikiran. Gandhi tidak memandang bahwa kebenaran absolut telah ia dapatkan, yang ada hanya kebenaran sebagaimana yang ia lihat. Hal ini mendasari bagaimana Gandhi kemudian memandang pluralitas agama. Sellars menjabarkan pandangan Gandhi tersebut dalam lima hal, yaitu : (a) permulaan dari agama-agama besar dunia dan dasar

---

<sup>10</sup> Gandhi, "Statement to the Press," Vol. LXVII, pp. 36-38, dikutip oleh Green, hal. 252, dikutip ulang oleh Sellars

pengajarannya; (b) penerimaan atas dasar pluralitas agama; (c) toleransi di antara para pemeluk agama; (d) percaya kepada Tuhan sebagai kebenaran; dan (e) kepentingan agama dalam masyarakat.

a. Permulaan dari agama-agama besar dunia dan dasar pengajarannya

Hal penting yang Gandhi lihat menurut Sellars bukanlah seseorang memilih yang mana, akan tetapi lebih kepada kebenarannya, pencerahan, dan pemenuhan diri yang didapatkan seseorang dalam jalannya, yang memberi makna religius pada jalan itu. Pada akhirnya, Gandhi mempertanyakan bagaimana kebencian, keserakahan, dan kebencian yang dirasakan oleh orang-orang terhadap mereka yang berbeda agama.

Gandhi menyadari bahwa tidak semua orang akan memilih jalan yang sama. Namun, tidak seperti orang-orang lain, Gandhi tidak akan mengatakan bahwa jalan yang dia ambil adalah jalan satu-satunya. Dia yakin bahwa semua jalan akan membawa pada tujuan yang sama. Keyakinannya ini membantu dia untuk menghargai agama orang lain.

b. Penerimaan atas pluralitas agama

Sellars mengatakan bahwa Gandhi menantang dunia untuk membentuk kesatuan yang menyadari fakta bahwa tidak peduli apa warna kulit, status sosial, ataupun jenis kelamin, kita semua berdarah merah, kita semua manusia. Begitu juga dengan agama. Setiap agama memiliki suatu nilai kebaikannya sendiri untuk ditawarkan. Pikirannya yang begitu terbuka memungkinkan dia untuk menemukan nilai dari tiap agama, ketimbang hanya mengkritisasinya. **Kesatuan** ini yang menjadi **aspek kedua** dalam pemikiran Parekh yang akan dibahas pada bab berikutnya.

c. Toleransi diantara para pemeluk agama

Gandhi menyadari bahwa tidak akan pernah ada kedamaian dan kehidupan yang harmonis di India selama setiap kelompok terus mencoba memisahkan diri dari kelompok-kelompok yang lain. Untuk mewujudkan kesejahteraan di India,

mereka semua harus bekerja sama. Lebih lanjut, tujuan ini tidak akan tercapai jika masing-masing masih memandang berdasarkan agama, suku, ras, atau jenis kelamin.

d. Percaya pada Tuhan sebagai kebenaran

Gandhi percaya bahwa Tuhan memiliki banyak manifestasi, dan kebenaran adalah yang dia cari.

e. Kepentingan agama dalam masyarakat

Pembentukan dunia yang baru harus mempertimbangkan posisi agama karena agama memiliki dampak yang besar terhadap budaya. Gandhi kemudian mengajarkan bahwa sebaiknya tidak ada agama yang begitu ditempatkan dominan dalam konstitusi masyarakat. Relijiusitas Gandhi menekankan toleransi dan penerimaan keberagaman diantara agama-agama dunia.

Dengan demikian, ada dua aspek pemikiran dari Mahatma Gandhi yang kemudian diambil dan dikembangkan oleh Parekh, yaitu kebebasan dalam keberagaman dan kesatuan. Pengembangan kedua aspek ini oleh Parekh akan dijelaskan pada bab III.

## 2. Charles Taylor

Charles Taylor adalah Profesor Filsafat dan Ilmu Politik di McGill University. Kontribusinya terhadap pemikiran filsafat politik dan politik identitas dibuktikan melalui karya-karyanya, antara lain *Multiculturalism and "The Politics of Recognition"* pada tahun 1992, yang kemudian dicetak ulang pada 1994 dengan judul *Multiculturalism*, dengan disertai komentar dari beberapa pemikir filsafat terkemuka, seperti Kwame Appiah, Jurgen Habermas, dan Michael Walzer.

Dalam beberapa buku yang dihasilkan Bhikhu Parekh, nama Charles Taylor beberapa kali disebut, baik sebagai teman diskusi maupun sebagai pemikir yang

dipinjam atau bahkan dikritik pemikirannya.<sup>11</sup> Parekh kemudian mengembangkan pemikiran Taylor tersebut dan membangun teori multikulturalisme-nya.

David Bromell, seorang anggota senior dari Institute of Policy Studies, Victoria University of Wellington, mengupas pemikiran Taylor secara mendalam.<sup>12</sup> Dari buku Taylor *Sources of the Self*, Bromell menarik lima analisis Taylor yang kemudian menjadi pusat pemikiran Taylor dalam *The Politics of Recognition*, yaitu:

- Seseorang bisa menjadi seseorang hanya di sekitar yang lain
- Tempat dimana kita berpijak selalu mengalami tantangan dan selalu berpotensi untuk berubah
- Penggabungan antar etika dan pemisahan kebebasan dari rasionalitas
- Kebutuhan untuk berhubungan atau menuju pada kebaikan sebagai salah satu aspirasi paling dasar manusia
- Usaha pembukaan ruang yang menyediakan tempat bagi klaim metafisik dan religius untuk bisa diuji melalui argumentasi moral

Dari konsep-konsep diatas, khususnya poin ke-4, jelas bahwa Taylor pun memandang adanya posisi naluriah manusia yang fundamental, yang selalu memerlukan adanya pemenuhan. Manusia kemudian dengan caranya sendiri-sendiri bergerak untuk mencari, menemukan, dan kemudian berinteraksi dengan apa yang diyakininya sebagai kebaikan tersebut—atau kebenaran menurut Gandhi. Tantangannya kemudian beralih pada bagaimana filsafat mampu memberi tempat pada setiap usaha maupun persepsi dan interpretasi manusia yang berbeda-beda tersebut akan kebaikan. Lebih jauh, kita perlu menyadari adanya pluralitas dari

---

<sup>11</sup> Dalam buku *A New Politics of Identity*, dan buku Parekh yang lain lagi, yaitu *Rethinking Multiculturalism*, yang menjadi kajian utama penelitian ini, Taylor disebut sebagai teman dan kolega yang membantunya mendiskusikan gagasan-gagasannya.

<sup>12</sup> David Bromell menulis buku *Ethnicity, Identity, and Public Policy* pada tahun 2008 dengan beberapa pemikir filsafat politik sebagai sumbernya, mulai dari Charles Taylor, Will Kymlicka, Iris Marion Young, hingga Bhikhu Parekh. Buku ini difokuskan untuk menelaah apakah multikulturalisme relevan sebagai kebijakan publik di Selandia Baru.

kebaikan, dan kemungkinan adanya konflik yang muncul dari kondisi ini, dan tidak membingkai konflik dengan mendelegitimasi salah satu atau beberapa kebaikan.<sup>13</sup>

Taylor juga membahas bagaimana otentisitas diri dalam membentuk identitas. Menurutnya, setiap orang punya hak (dan sebuah tanggung jawab ) untuk mengembangkan kehidupan mereka sendiri, dengan dasar apa yang mereka putuskan penting atau bernilai.<sup>14</sup>

Pada bukunya yang berjudul *The Politics of Recognition*, Taylor menekankan pentingnya pengakuan dalam pembentukan sebuah identitas. Menurutnya, ada dua perubahan yang berpengaruh terhadap identitas dan pengakuan,<sup>15</sup> yaitu:

- Kemerosotan hierarki sosial dan penggantian gagasan akan “kehormatan” dengan universalitas dan egalitarian
- Kemunculan cita-cita atas otentisitas individual di akhir abad 18

Konsep *significant others* digunakan Taylor untuk menggambarkan orang lain yang memiliki hubungan penting secara fungsional-sosial dalam relasi. Dengan menekankan bahwa sisi krusial dari kehidupan manusia adalah karakter dialogisnya yang mendasar,<sup>16</sup> Taylor menempatkan orang lain dalam posisi signifikan dalam menentukan identitas yang kemudian terbentuk dan mendefinisikan seseorang.

*We define our identity always in dialogue with, sometimes in struggle against, the things our significant others want to see in us.*<sup>17</sup>

Sebelumnya, pengakuan atas identitas muncul sebagai sesuatu yang diturunkan secara sosial, dan kemudian diterima begitu saja. Sekarang, pengakuan harus dimenangkan secara dialogis. Ini sebabnya mengapa kebutuhan atas pengakuan menjadi mengemuka, baik di ranah publik maupun privat.

---

<sup>13</sup> Taylor, “Sources of The Self,” hal. 36-38, dikutip oleh Bromell, *Ethnicity, Identity, and Public Policy*, hal. 85

<sup>14</sup> Taylor, “The Ethics of Authenticity,” hal. 18, dikutip oleh Bromell, op.cit. hal. 87

<sup>15</sup> Taylor, “The Politics of Recognition,” hal. 26-28

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 32



Selanjutnya, pada ranah publik, Taylor memunculkan dua hal berbeda dari politik pengakuan akan kesetaraan yang saling berhubungan satu sama lain,<sup>18</sup> yaitu:

- Politik universalisme

Politik ini menegaskan pengakuan yang setara atas semua warga negara berikut hak-haknya.

- Politik perbedaan

Setiap orang harus diakui atas keunikan identitasnya masing-masing, dan perbedaan bukan untuk diabaikan atau diasimilasikan pada identitas yang dominan.

Kedua hal ini kemudian berujung pada suatu kerancuan. Di satu sisi, politik universalisme datang untuk memberi pengakuan pada apa yang muncul secara universal, yaitu potensi universal manusia yang mampu menggerakkan kehidupan bersama-sama secara otonom.<sup>19</sup> Sementara itu, bagi politik perbedaan hal ini justru menjadi diskriminatif, karena merefleksikan sebagian atau justru yang dominan.<sup>20</sup>

Kerancuan politik akan pengakuan kesetaraan ini kemudian membuat Parekh merasa perlu merumuskan suatu bentuk dan struktur politik baru yang lebih mampu menampung keberagaman, dengan tetap menjaga kesatuan diantara komunitas-komunitas kultural tersebut (Parekh, 2008a, hal. 263).

Dari penjelasan singkat tentang konsep Taylor di atas, dapat dilihat bagaimana akhirnya Parekh menemukan aspek terakhir dari pemikirannya tentang multikulturalisme kontemporer, yaitu struktur politik baru yang berpihak pada multikulturalisme.

Penulis kemudian mencoba untuk membuat perbandingan singkat antara pemikiran Gandhi dan Taylor dengan aspek-aspek pemikiran Parekh sebagai variabelnya.

- Persamaan

(1) Adanya kebutuhan manusia untuk menuju pada kebenaran dan kebaikan

---

<sup>18</sup> Ibid. hal. 37-38

<sup>19</sup> Ibid. hal. 38-39

<sup>20</sup> Ibid. hal. 43

Gandhi: manusia akan selalu bergerak mencari kebenaran  
Taylor : pencarian atas nilai-nilai kebaikan sebagai kebutuhan dasar manusia

(2) Adanya pluralitas dalam kebenaran maupun kebaikan

Gandhi: ketidaksempurnaan manusia memiliki implikasi logis tiadanya konsep kebenaran yang mencakup semua aspek kehidupan.

Taylor : persepi/ interpretasi manusia yang berbeda-beda memunculkan konsepsi beragam atas nilai-nilai kebaikan

(3) Tatanan masyarakat yang dituju

Baik Gandhi maupun Taylor berusaha mewujudkan keberagaman sebagai suatu kekayaan kultural

(4) Masing-masing memiliki konsep kebebasan

Gandhi: kebebasan dalam keberagaman

Taylor : hak dan tanggung jawab asasi

• Perbedaan

(1) Bidang kajian

Gandhi: permasalahan budaya

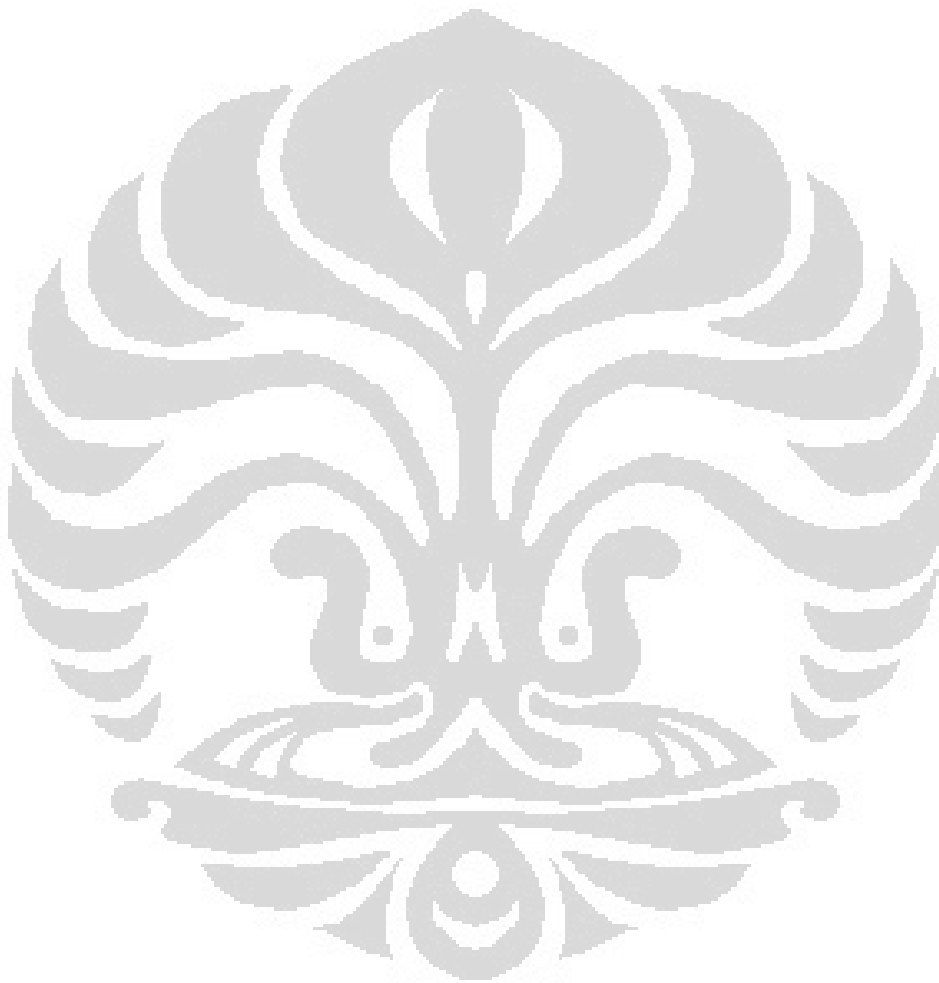
Taylor : permasalahan politik

(2) Pandangan akan pentingnya pengakuan

Walaupun sama-sama mengusahakan kesetaraan antar manusia, namun Gandhi luput dalam memperhatikan pentingnya suatu pengakuan dari orang lain dalam pembentukan identitas manusia, sesuatu yang justru menjadi pusat perhatian Taylor. Gandhi terlalu berfokus pada penerimaan keberagaman konsep pemikiran manusia, yang justru melepaskan perhatiannya dari identitas kemanusiaan itu sendiri. Hilangnya pemberian tempat akan pengakuan dari orang lain dalam pembentukan identitas diri, berakibat pada hilangnya proses dialogis diantara keduanya.

Secara singkat, keterkaitan Gandhi dan Taylor terhadap pemikiran Parekh dapat dilihat pada ketiga aspek utama pemikiran Parekh pada buku *Rethinking Multiculturalism*,

yang kemudian menjadi aspek-aspek utama kajian atas tantangan bagi multikulturalisme kontemporer. Ketiga aspek itu adalah **kesatuan** dan **dinamika keberagaman**, yang didapati Parekh dari inti pemikiran Gandhi, serta **struktur politik** yang dirumuskan dari pemikiran Taylor. Bagaimana ketiga aspek tersebut dikembangkan oleh Parekh, akan dibahas penulis pada bab berikutnya.



## **BAB III**

### **MULTIKULTURALISME KONTEMPORER DALAM PANDANGAN PAREKH**

Pada bab III ini, penulis akan menjabarkan bagaimana Bhikhu Parekh mendefinisikan dan memaknai multikulturalisme kontemporer, serta menjelaskan bagaimana tantangan kemudian muncul dan memberi dilematika pada multikulturalisme masa kini.

#### **III.1. MULTIKULTURALISME, BATASAN DAN PERKEMBANGANNYA**

##### **III.1.1. Batasan Multikulturalisme**

Saat ini, setiap pembicaraan mengenai perbedaan dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat akan berujung pada pembahasan konsep multikulturalisme. Meski demikian, tidak setiap perbedaan pada dasarnya dapat dikaitkan atau bahkan diselesaikan pada sikap penerimaan akan perbedaan seperti yang ada dalam multikulturalisme. Perbedaan yang khusus dibahas dan menjadi topik permasalahan pada multikulturalisme adalah perbedaan yang diperoleh secara kultural, sehingga perbedaan tersebut memiliki suatu sistem pemaknaan dan historisitas yang telah terstruktur (Parekh, 2008a, hal. 15). Dengan kata lain, materi multikulturalisme adalah perbedaan atau keanekaragaman yang dilekatkan secara kultural.

Ada beberapa bentuk keanekaragaman kultural dalam masyarakat modern, yaitu: (a) keanekaragaman subkultural; (b) keanekaragaman perspektif; dan (c) keanekaragaman komunal (Parekh, 2008a, hal. 16).

##### **a. Keanekaragaman subkultural**

Keanekaragaman subkultural adalah kondisi dimana para anggotanya mengakui adanya budaya bersama dan tidak menuntut adanya suatu budaya alternatif, tetapi berusaha membuat budaya yang sudah ada tersebut menjadi lebih plural. Plural disini dimaksudkan bahwa budaya tersebut mampu menerima gaya hidup atau struktur dalam keluarga yang berbeda dari kebanyakan. Apa yang diperjuangkan kaum gay, lesbian, atau para kaum

hedonis untuk diterima ditengah masyarakat mereka, termasuk dalam keanekaragaman jenis ini.

### **b. Keanekaragaman perspektif**

Keanekaragaman perspektif terjadi dalam ranah intelektual. Ada suatu upaya dari sebagian masyarakat untuk merubah prinsip-prinsip fondasional dari budaya yang berlaku. Mereka tidak berusaha mengganti budaya tersebut dengan budaya baru, hanya saja mereka mempertanyakan landasan intelektual dari budaya yang sudah ada, dengan mengajukan perspektif baru atas aplikasi budaya tersebut. Perspektif baru tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan untuk mendekonstruksi tatanan budaya sebelumnya. Keanekaragaman seperti ini pada umumnya terjadi saat perspektif berbeda atas budaya tersebut hanya diterima secara idea, namun tidak dalam eksekusinya. Perjuangan seperti ini ditunjukkan oleh kaum feminis untuk menentang patriarki, atau kaum religius saat memerangi sekularitas.

### **c. Keanekaragaman komunal**

Keanekaragaman komunal terdiri dari komunitas-komunitas yang memiliki cara hidup dan sistem keyakinan yang bermacam-macam, namun lebih terorganisir dengan baik. Yang dimaksud dengan komunitas disini adalah para imigran atau para pendatang yang berusaha untuk tidak meninggalkan cara hidupnya saat memasuki suatu kelompok masyarakat baru, yang nyata-nyata memiliki kultur berbeda dari mereka.

Secara singkat, ketiga jenis keanekaragaman tersebut bisa dibedakan sebagai berikut:

- Subkultur : ada budaya bersama, yang diusahakan adalah penerimaan terhadap gaya hidup yang berbeda.
- Perspektif : ada budaya bersama, yang diusahakan adalah budaya bersama tersebut bisa ditinjau ulang pemaknaan dan perwujudannya dengan menggunakan perspektif baru.
- Komunal : tidak ada budaya bersama, karena setiap komunitas memiliki sejarah yang panjang atas cara hidup, tatanan, dan keyakinan masing-masing. Yang diusahakan dalam keanekaragaman ini adalah setiap komunitas dapat hidup bersama dengan kulturnya masing-masing.

Menurut Parekh, masyarakat yang multikultural menunjuk pada masyarakat yang memiliki keanekaragaman perspektif dengan komunal, keanekaragaman subkultur dengan komunal, ketiga-tiganya, atau keanekaragaman komunal saja (Parekh, 2008a, hal. 19). Hal ini disebabkan masyarakat dengan keanekaragaman komunal memiliki kompleksitas keberagaman yang lebih tinggi, terkait dengan kemapanan dan historisitas masing-masing kultur di dalamnya. Selanjutnya, sebuah masyarakat yang multikultural adalah masyarakat yang setidaknya memiliki dua atau lebih keanekaragaman komunal.

Menanggapi keberagaman yang ada, setidaknya ada dua respon yang muncul. Yang satu menyuarakan perlunya peleburan budaya diantara budaya-budaya yang berusaha bertahan tersebut, atau sisanya justru menginginkan penghargaan dan pemberian tempat bagi setiap tuntutan dari masing-masing budaya. Yang pertama selanjutnya disebut monokulturalis, dan yang berikutnya dinamakan multikulturalis. Dengan kata lain, multikultural adalah kondisi empirik dimana keberagaman ada di tengah masyarakat, baik disengaja maupun tidak. Sedangkan multikulturalis mensyaratkan tanggapan nyata untuk memberikan ruang hidup bagi keberagaman, sehingga keberagaman tersebut bisa tetap ada sebagai konsekuensi logis atas pilihan masyarakatnya. Penggunaan kata multikulturalitas akan menunjuk pada tingkatan keberagaman yang ada dalam masyarakat tersebut.

### **III.1.2. Perkembangan Multikulturalisme**

Saat ini komunitas multikultural di dunia terdiri atas dua sumber utama, yaitu etnik dan agama. Oleh karena itu, komunitas multikultural yang ada terbangun dari kondisi yang multi-agama, multi-etnik, atau keduanya.<sup>21</sup> Sama seperti peradaban yang terus berkembang dari masa ke masa, multikulturalisme sebagai sebuah perspektif akan kehidupan kultural dalam masyarakat pun terus berevolusi dan mengalami penyesuaian. Pada jaman dimana globalisasi begitu mengemuka dalam perekonomian, demokrasi menjadi sebuah panutan dalam ideologi pemerintahan, dan industrialisasi memegang peran atas humanitas, diperlukan adanya pandangan yang lebih komprehensif akan realita kultural dalam kondisi jaman yang berbeda.

---

<sup>21</sup> Parekh, Bhikhu. *A Commitment to Cultural Pluralism*

Multikulturalitas itu sendiri pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru muncul setelah modernisasi mengemuka, meskipun pada masa itu belum didapati adanya negara yang bisa dikatakan multikulturalis. Parekh menunjuk kekaisaran Romawi, Ottoman, dan India serta Eropa pada abad pertengahan sebagai contoh dari negara-negara yang telah terlebih dulu menjadi multikultural. Lalu, apa sebenarnya yang bisa memampukan negara multikultural pada masa kini untuk menjadi multikulturalis? Apa yang membedakannya dengan kondisi pada masa-masa sebelumnya?

Parekh menyebutkan setidaknya ada empat karakteristik dari situasi masyarakat multikultural saat ini, yang kemudian mampu mendorong masyarakat tersebut menjadi multikulturalis (Parekh, 2008a, hal. 21). Tidak ada yang saling mendahului atau pun dominan dari keempat stimulan situasional ini. Karakteristik masyarakat multikultural kontemporer tersebut adalah:

**a. Multikulturalitas kontemporer lebih luas dan sekaligus lebih mendalam**

Semakin banyaknya aspek dalam eksistensi manusia yang dicakup dalam keberagaman kultural membuat tuntutan akan tatanan yang multikulturalis menjadi lebih luas. Selain itu, pembahasan akan multikulturalitas pun semakin mendalam terkait dengan semakin banyaknya konsepsi akan hidup yang dijadikan pijakan dalam pembahasan kajian multikultural. Pada masa pramodern, apapun perbedaan yang ada dan mengemuka, hampir semua diantara mereka termasuk golongan religius, atau setidaknya mereka masih berbagi moralitas yang sama dan hidup dengan praktek-praktek sosial yang seragam. Saat ini, baik moralitas, religiusitas, hingga pola interaksi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat sangatlah plural. Hal ini membuat kajian akan multikulturalitas, atau yang selanjutnya akan disebut multikulturalisme, menjadi lebih luas dan mendalam.

**b. Multikulturalitas kontemporer menjadi lebih radikal**

Masyarakat minoritas pada masa pramodern menerima begitu saja status mereka yang subordinat, keterbatasan akses sosial mereka, hingga batasan geografis yang ditetapkan pada mereka oleh kaum yang lebih dominan. Akan tetapi, semangat liberalisme dan demokrasi merubah itu semua. Setiap lapisan masyarakat, tidak peduli seberapa minor tempat mereka berpijak, menuntut adanya suatu perlakuan yang setara. Mereka menuntut

hak individu mereka, bahwa secara personal tidak ada perbedaan antara mereka yang berlatar belakang kaum mayoritas ataupun minoritas. Mereka, kaum minoritas, menolak adanya perolehan status dalam masyarakat yang didapatkan secara turun-temurun, *taken as granted*. Baik status sebagai warga negara, hak politik, kekuasaan, dan peluang untuk berpartisipasi dalam kehidupan kolektif, semuanya harus didapatkan dengan cara yang sama, oleh siapapun itu. Semuanya harus diperjuangkan, dan diperoleh sebagai suatu penghargaan atas upaya personal. Pada poin ini, multikulturalisme kontemporer menuntut adanya kesetaraan diantara setiap warga negara, dan dilangsungkan dalam semua aspek kehidupan.

**c. Multikulturalitas kontemporer mendapat pengaruh dari globalisasi**

Globalisasi dipandang Parekh sebagai sebuah fenomena yang paradoksal. Di satu sisi, globalisasi memacu munculnya heterogenitas. Dalam hal ini, globalisasi meningkatkan migrasi individu-individu bahkan segenap anggota komunitas, dan menyebarkannya pada berbagai lapisan masyarakat. Di lain sisi, globalisasi mengarahkan pada ide tentang homogenisasi pemikiran, institusi, moral dan praktek sosial. Pada sisi ini, globalisasi menengahkan iklim kompetisi dan persaingan antar kultur untuk mengaktualisasi dan mendefinisikan dirinya ditengah begitu beragamnya tradisi-tradisi baru yang muncul dalam wadah pluralisme. Kondisi ini dengan sendirinya menciptakan suatu proses dialektik yang kompleks antar kultur.

**d. Multikulturalitas kontemporer pada akhirnya menuntut hak-hak komunal**

Pada tingkat lanjut ini, kesetaraan yang muncul karena semangat liberalisme pun pada akhirnya tidak akan cukup. Di negara-negara yang memiliki tingkat keberagaman tinggi, alokasi hak-hak yang sama tidak bisa diterima semua golongan. Komunitas yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Kondisi ini membuat mereka pada akhirnya menuntut hak yang berbeda, bahkan penetapan hukum yang berbeda, yang memberi tempat pada karakteristik komunal mereka. Hal ini tergambar pada apa yang disampaikan oleh Presiden Mitterand dari Perancis saat ia masih memerintah, bahwa ‘masyarakat dan budaya minoritas’ harus diberi ‘hak atas ke-berbeda-annya’ dan mempertahankan ‘kekhasannya’ (Parekh, 2008a, hal. 487).



Dari keempat karakteristik masyarakat multikultural kontemporer tersebut, kita bisa merumuskan perkembangan masyarakat multikultural sebagai berikut:

1. masyarakat multikultural pramodern menerima begitu saja segala penempatan, posisi, porsi, dan perlakuan yang mereka terima dari mereka yang lebih dominan. Pada masa ini, penghormatan, status, dan penghargaan yang diterima secara turun-temurun untuk kemudian diwariskan begitu saja adalah hal yang wajar.
2. masyarakat multikultural modern mulai memberi tempat pada hal-hal yang dimiliki secara individu. Pemerintah pada masa itu menciptakan suatu ruang hukum yang homogen, sebagai tempat agar para pemilik hak-hak individual tersebut dapat hidup bersama dalam suatu koridor yang memiliki batasan yang diterima bersama. Permasalahannya, selama masih ada homogenisasi dalam masyarakat, ruang bagi sebuah komunitas untuk memunculkan ciri-ciri yang menjadi bagian dari jati diri mereka secara komunal, tidak cukup mengakomodasi kebutuhan kultural mereka.
3. masyarakat multikultural kontemporer muncul karena keterbatasan dari ruang yang mereka terima pada masa multikultural modern. Mereka sadar bahwa sebagai sebuah komunitas kultural, diperlukan suatu jaminan yang membuat mereka cukup terfasilitasi untuk bergerak dan teridentifikasi sebagai sebuah komunitas yang berbeda. Jaminan ini diharapkan pada akhirnya mampu membuat mereka merayakan 'kekhasannya'.

Perjalanan masyarakat multikultural pada akhirnya sampai pada masa kontemporer yang memiliki permasalahannya sendiri. Permasalahan-permasalahan ini kemudian menjadi pekerjaan rumah yang harus mampu diselesaikan untuk dapat mewujudkan sebuah pemerintahan bagi masyarakat yang multikultural. Permasalahan tersebut antara lain mengenai hak-hak budaya dari kaum minoritas, dasar-dasar pemikiran atas hak-hak kolektif, serta hubungan negara dengan kebudayaan. Selain itu, ada beberapa pertanyaan yang harus bisa dijawab sebelum kita merumuskan bagaimana seharusnya masyarakat yang multikultural, seperti apakah keanekaragaman budaya ini merupakan suatu fenomena transisional semata atau permanen? Apakah semua kebudayaan layak mendapat penghargaan yang sama? Lalu, bagaimanakah kebudayaan tersebut dinilai, menurut kita sendiri, menurut mereka yang menjalani, atau ada suatu standar nilai

universal untuk itu, dan dari manakah standar nilai itu berasal? Pembahasan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijabarkan pada subbab berikutnya mengenai tantangan bagi multikulturalisme pada masa kontemporer.

## **III.2. TUNTUTAN DALAM MULTIKULTURALISME KONTEMPORER**

### **III.2.1. Kebutuhan Masyarakat Multikultural Kontemporer**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, masyarakat yang multikultural pada masa modern mengalami perkembangan yang signifikan setelah berada pada masa kontemporer. Pada masa modern, semangat liberalisme begitu mempengaruhi intelektualitas segala lapisan masyarakat, sehingga yang diperjuangkan adalah hak-hak bagi setiap individu. Setiap individu adalah setara, memiliki hak yang sama. Setiap permintaan akan hak yang berbeda mengancam prinsip kesetaraan dalam liberalisme.

Sementara itu, pada masa kontemporer, negara-negara dengan keberagaman kultural tinggi menemukan permasalahan dengan apa yang disediakan oleh liberalisme. Beberapa kelompok atau komunitas dalam masyarakat, menolak untuk diperlukan hanya sebagai individu-individu yang memiliki hak-hak yang setara. Mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan sebagai sebuah komunitas terutama secara kultural yang tidak terpenuhi. Sekali lagi, komunitas yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Mereka menuntut hak, akses, dan kesempatan yang berbeda untuk hal-hal khusus yang berbeda pula.

Pemenuhan kebutuhan yang tidak seragam ini, dengan cara yang tidak terkonseptualisasi dan terkoordinasi dengan baik, akan menciptakan perpecahan dalam tubuh masyarakat, dan bisa berujung pada disintegrasi bangsa (Parekh, *A Commitment to Pluralism*). Hal ini disebabkan pemenuhan kebutuhan yang beragam ini tidak bisa begitu saja dilangsungkan dengan konstitusi yang mengutamakan kesetaraan dalam distribusi hak-hak warga negaranya.

Dari kondisi ini, terlihat bahwa masyarakat multikultural kontemporer jelas-jelas membutuhkan pemenuhan akan kebutuhan keberagaman kultural mereka secara kolektif. Namun, tidak berhenti sampai disitu, mereka juga sekaligus membutuhkan kesatuan antar

individu dalam masyarakat sebagai warga negara. Untuk apa? Kesatuan tetap dibutuhkan oleh masyarakat untuk memungkinkan mereka semua tetap bergerak sebagai suatu komunitas tunggal pada akhirnya, sehingga mereka sanggup mengambil putusan bersama untuk kehidupan mereka secara umum. Selain itu, hanya dengan berada dalam satu kesatuan mereka mampu mengatasi konflik antar komunitas kultural yang bisa setiap saat muncul diantara mereka. Akan tetapi, atas nama perwujudan kesatuan ditengah masyarakat, prinsip-prinsip yang memberi ruang pada keberagaman kultural tidak boleh terabaikan. Setidaknya ada tiga alasan untuk mewujudkan kesatuan yang tetap memberi ruang akan keberagaman (Parekh, *A Commitment to Pluralism*).

Alasan pertama keberagaman kultural harus ada dalam usaha mewujudkan kesatuan adalah bahwa keberagaman kultural adalah fakta yang tidak terelakkan dalam kehidupan sosial masyarakat kontemporer. Usaha untuk menyatukan masyarakat dalam suatu institusi tidak boleh tercampuradukkan dengan usaha menyatukan perbedaan. Kedua hal ini sangat berbeda. Setiap usaha menyatukan perbedaan akan mengancam keberadaan dari keberagaman dan setiap komunitas kultural didalamnya. Dengan adanya usaha menyatukan perbedaan, akan timbul tingkat kecemasan tinggi dalam interaksi antar komunitas kultural. Lebih jauh lagi, kondisi ini memacu terjadinya perpecahan dan perselisihan antar komunitas dalam menentukan kultur mana yang seharusnya dipertahankan diantara mereka. Pada akhirnya, usaha menyatukan perbedaan hanya menjadi kontraproduksi dengan usaha untuk menyatukan masyarakat dengan pluralitas tinggi tersebut.

Yang kedua, meskipun keberadaan manusia tidak terdeterminasi oleh keberadaan budaya, namun kemanusiaan mereka terbentuk olehnya. Budaya mengidentifikasi manusia sebagai individu yang partikular bersama komunitas yang partikular pula. Dengan kata lain, identitas kultural setiap individu selalu partikular. Untuk menjadi seseorang dengan latar belakang budaya tertentu sama dengan menjadi seseorang dengan gaya hidup dan cara hidup tertentu, tergantung budaya apa yang ada dibalik dirinya. Oleh karena itu, masyarakat dengan tingkat keberagaman tinggi seperti ini mensyaratkan adanya sikap saling menghargai antar individu antar komunitas kultural.

Yang ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman kultural justru menjadi suatu kekayaan tersendiri dalam suatu komunitas bermasyarakat. Kondisi ini memperluas

intelektualitas kultural, sekaligus memberi variasi pemahaman moralitas dalam keseharian. Singkatnya, keberagaman kultural disini menjadi faktor vital dalam kebebasan masyarakat serta menjadi kondisi prasyarat bagi progresifitas manusia.

Dari ketiga prinsip tersebut, terlihat jelas bahwa setiap usaha menyatukan masyarakat yang memiliki keberagaman kultural tinggi dalam satu institusi, ada suatu tuntutan untuk tetap mempertahankan keberagamannya. Pada akhirnya, inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi multikulturalisme kontemporer. Perwujudan kesatuan sekaligus keberagaman kultural, beragam namun tetap dalam satu kesatuan.

Untuk menjawab permasalahan ini, terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana Parekh mengkonseptualisasi keberagaman kultural yang harus dipertahankan dalam masyarakat multikultural dan kemudian merumuskan konsep pemerintahan yang mampu mewujudkan kesatuan masyarakatnya.

### **III.2.2. Memahami Keberagaman Kultural dalam Multikulturalisme Kontemporer**

#### **Konsep Kebudayaan**

Untuk memahami keberagaman kultural yang dimaksud oleh Parekh, kita terlebih dahulu harus menelaah konsep kebudayaan yang dimaksud oleh Parekh. Parekh menggunakan kebudayaan untuk menunjuk suatu sistem tentang keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek tertentu. Lebih lanjut, kebudayaan diartikan oleh Parekh sebagai sebuah sistem arti dan makna yang tercipta secara historis atau tercipta menuju hal-hal yang sama; sebuah sistem keyakinan dan praktek dimana satu kelompok manusia memahami, mengatur, dan menstrukturkan kehidupan individual dan kolektif mereka (Parekh, 2008a, hal. 196).

Kebudayaan yang dimaksud Parekh ini dapat diartikulasikan dalam beberapa tahapan (Parekh, 2006, hal. 197). Pada tahap dasar, kebudayaan terwujud dalam bahasa. Seperti kita ketahui, bahasa sebagai sarana komunikasi terkonstruksi dari kebudayaan masing-masing daerah. Sebuah daerah yang berada di perbatasan dua kebudayaan, mendapat pengaruh dari budaya-budaya disekitarnya, dan hal tersebut turut membentuk struktur, kosa kata, serta pola interaksi komunikasinya. Masyarakat di daerah perbatasan

tersebut akan memiliki bahasa yang bisa dilihat sebagai perpaduan bahasa dari budaya-budaya sekitar yang mempengaruhi budaya mereka.

Pada tahapan berikutnya, kebudayaan akan teraktualisasi dalam berbagai literatur, karya sastra, kesenian, bahkan moralitas dan visi hidup. Di daerah dengan struktur budaya yang mengutamakan kelembutan, selain mempengaruhi cara mereka bertegur sapa, juga akan mempengaruhi bentuk-bentuk tarian mereka, bahkan hal-hal yang dianjurkan dan dilarang untuk dilakukan dalam norma-norma mereka. Kembali lagi dengan daerah yang berada di perbatasan budaya tadi, bentuk-bentuk tarian, kesenian, dan bahkan prinsip hidup mereka juga akan mengalami perpaduan dari apa yang dimiliki daerah di sekitar mereka.

Berbicara mengenai moralitas dalam budaya masyarakat, moralitas memang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Dalam konteks ini, budaya membentuk sekaligus menstrukturkan kehidupan moral masyarakat, termasuk segala konten dan konteksnya. Hal ini terlihat dari bagaimana mengkonstruksi adat-istiadat dan ritual kita. Sebagai contoh, bagaimana sikap kita seharusnya terhadap orang tua, bagaimana seharusnya kita menyambut orang asing, sampai bagaimana kita menyikapi kematian. Semua cara menanggapi bahkan tata cara penyikapan atau tindak lanjutnya pun diatur dalam budaya kita.

Sementara itu, visi hidup berbicara tentang apa yang dipercayai sebagai hal-hal yang sepatutnya diusahakan dan dituju oleh masyarakatnya, sesuatu yang menjadi pedoman sebagai kebaikan yang utama. Kepercayaan dan praktek budaya disini memiliki keterikatan yang sangat nyata. Namun demikian, keduanya memiliki tataran nyata yang membuat keduanya mampu dibedakan dengan jelas. Yang pertama, dilihat dari segi perwujudannya, kepercayaan sifatnya interpretatif, sedangkan budaya lebih definitif dan konkret. Interpretatif dalam arti bahwa kepercayaan tidak memiliki bentuk yang sangat baku, dan dipertanggungjawabkan pada interpretasi yang mendasarinya. Sementara itu, kebudayaan cukup konkret dalam mengatur pola interaksi antara manusia.

Yang kedua, dilihat dari segi penerapannya, kepercayaan sulit diaplikasikan, sementara budaya lebih aplikatif. Kepercayaan bukan sesuatu yang perangkat dan norma-normanya mudah ditemukan untuk dijalankan, sementara kebudayaan begitu mudah untuk dievaluasi kesesuaian penerapannya. Yang ketiga, dari segi konten yang dibahas

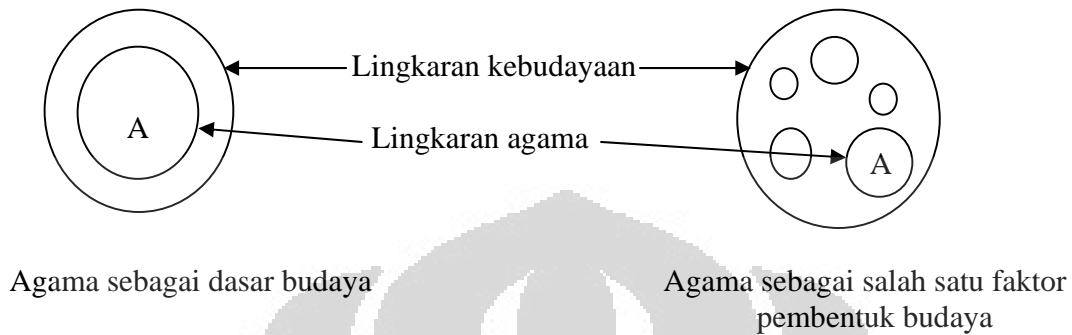
didalamnya, kepercayaan lebih kepada intelektualitas sementara budaya lebih kepada kecocokan praktis. Kemudian, yang terakhir, sesuai dengan apa yang menjadi konten bahasannya, kepercayaan dan kebudayaan menjadi berbeda saat kita melihat pada apa yang mampu mempengaruhi masing-masing konsep tersebut. Kepercayaan karena berisi pembahasan intelektualitas, lebih banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang muncul kemudian, sementara kebudayaan lebih dipengaruhi oleh perkembangan situasi sosial masyarakatnya. Oleh karena semua perbedaan ini, perubahan kepercayaan belum tentu diikuti oleh perubahan kebudayaan, demikian juga sebaliknya.

Lalu bagaimana dengan agama? Karena agama menjadikan relasi antar manusia sebagai salah satu sentral bahasannya, maka agama menjadi sangat berhubungan dengan kebudayaan. Akan tetapi, dalam kebudayaan yang berbeda, peran agama di dalamnya juga akan berbeda (Parekh, 2008a, hal. 201). Pada satu titik, agama membentuk sistem kepercayaan sekaligus prakteknya dalam satu kebudayaan. Pada titik yang lain, budaya yang bergerak mengarahkan bagaimana agama diinterpretasikan. Apa implikasinya? Saat agama membentuk sistem kepercayaan sekaligus prakteknya dalam kebudayaan, maka pergantian agama seseorang akan merubah gaya hidupnya juga. Sebaliknya, saat budaya membentuk interpretasi agama, maka pada budaya berbeda akan berbeda pula bentuk aplikasi agamanya. Untuk kasus yang ini, kita bisa membandingkan aplikasi agama Islam atau Kristen di Eropa dan Asia.

Lebih lanjut, dilihat dari pengaruhnya, setidaknya ada dua posisi agama terhadap kebudayaan, yaitu yang pertama sebagai dasar dari budaya, dan yang kedua sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi budaya. Sebagai dasar dari budaya, agama akan menghasilkan suatu kebudayaan yang berlandaskan pada ajaran agama yang kokoh. Sisi positifnya, kebudayaan tersebut jauh lebih mudah didefinisikan dan diaplikasikan bersama. Di sisi lain, kebudayaan seperti ini akan lebih mudah berubah secara radikal saat mengalami reinterpretasi dengan tepat.

Saat bergerak sebagai faktor yang mempengaruhi budaya, agama akan memperkaya sudut pandang dan interpretasi terhadap budaya itu sendiri, memberi variasi akan nilai kebaikan dalam suatu budaya. Namun, tentu saja, posisinya akan terus diuji dan dipertanyakan oleh moralitas yang lain. Akan tetapi, hal ini justru membuat budaya

tersebut menjadi lebih mudah untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri, bahkan tidak mudah bubar saat berusaha menyerap nilai kebaikan diluar dirinya.



**Gambar 3**  
**Peta Posisi Agama dan Budaya**

Dari ilustrasi di atas, dapat kita lihat bahwa saat agama menjadi dasar bagi suatu budaya, lingkarannya mendominasi area kebudayaan tersebut. Akan tetapi, tetap saja ada suatu ruang yang kosong yang tidak diisi oleh agama, namun termasuk dalam lingkaran kebudayaan. Hal ini disebabkan tidak semua yang ada dalam budaya termasuk dalam aspek-aspek yang secara nyata diatur dalam agama. Contohnya, agama tidak mengajarkan secara rinci bagaimana tata cara makan, menyikat gigi, ataupun duduk yang baik. Hal-hal seperti itu dikembangkan dan diatur dalam budaya, walaupun budaya tersebut dibangun dari suatu agama tertentu.

Sementara itu, saat agama hanya menjadi salah satu faktor pembentuk budaya, ada lingkaran-lingkaran lain yang ikut mempengaruhi apa yang ada dalam lingkaran kebudayaan. Lingkaran-lingkaran lain tersebut mungkin sama besar, lebih kecil, atau mungkin lebih besar dari lingkaran agama. Pada akhirnya, agama tidak mendominasi interpretasi atas hal-hal yang ada dalam lingkaran kebudayaan tersebut.

Kemudian bagaimana relasi kebudayaan-kebudayaan tersebut dengan setiap individu didalamnya? Setidaknya ada tiga cara relasi yang biasa dipraktekkan antara individu dengan kebudayaannya (Parekh, 2008a, hal. 204). Relasi tersebut terbagi dalam:

(1) memegang teguh budayanya; (2) menjadi lebih inovatif; (3) membebaskan diri dari budayanya.

Pada relasi yang pertama, individu-individu yang ada di dalamnya akan berusaha untuk menjalani hidupnya dengan memegang teguh apa yang diajarkan leluhurnya kepadanya. Mereka akan hidup dengan menjadikan apa yang dikatakan baik oleh budayanya sebagai pedoman mereka, dan meletakkan apa yang diinginkan komunitas budayanya sebagai tujuan hidupnya. Karena suatu budaya dimungkinkan memiliki beberapa pengaruh sekaligus, maka cara hidup seperti ini memerlukan suatu penelaahan dan pemilihan sikap yang sesuai, dan tidak jarang ditemui individu yang menuju sesuatu yang berbeda saat berusaha hidup dalam budaya asal yang sama. Oleh karena itu, tetap diperlukan suatu sikap pluralitas antar individunya. Hal ini diperlukan untuk dapat menerima perbedaan sikap yang mungkin ada setelah melalui tahap seleksi tersebut.

Pada relasi yang kedua, individu tidak sekedar menjaga pluralitas diantara setiap anggota komunitas budaya, namun juga membuka diri untuk meminjam apa yang bernilai dari perspektif individu lain, dan bahkan budaya lain. Sikap ini kemudian dapat memperkaya pemahaman individu tersebut akan apa yang baik dan benar untuk dijalani. Selanjutnya, sikap seperti ini akan membuka suatu iklim dialogis antar individu antar budaya.

Jenis relasi yang terakhir menggambarkan individu yang tidak memiliki loyalitas pada satu kebudayaan tertentu, dengan terus bergerak mencari nilai-nilai yang baik dari setiap budaya yang ia temui, untuk kemudian mengkonstruksi apa yang baik untuk dirinya sendiri. Walaupun cara hidup seperti ini bisa membuat individu tersebut begitu kreatif dan inovatif, namun ketiadaan pengalaman yang mendalam akan suatu budaya menjadikannya kehilangan kestabilan kultural. Kondisi ini dapat berdampak pada kerapuhan pedoman moral yang dia jalani.

Individu-individu yang bergerak dalam kumpulan masyarakat yang bersatu menurut budaya yang sama tersebut membentuk sebuah komunitas budaya (Parekh, 2008a, hal. 210). Komunitas budaya ini memiliki setidaknya dua dimensi, dimensi budaya dan komunal. Dimensi budaya adalah isi dalam bentuk budaya khusus, sedangkan dimensi komunal adalah sekelompok laki-laki dan perempuan yang berbagi budaya tersebut. Keduanya berkaitan, namun tidak saling menuntut untuk berjalan bersamaan.



Contohnya, para imigran yang meninggalkan komunitas budayanya, namun tetap berusaha menjalankan budaya asal mereka. Sebaliknya, dapat ditemui juga individu-individu yang tidak setuju dengan budaya asal mereka, namun tidak bergerak meninggalkan komunitas budaya tersebut dan tetap tinggal diantara mereka.

Jika demikian, budaya yang mana yang dapat kita katakan sebagai ‘budaya kita,’ komunitas budaya tempat kita berada atautkah budaya asal kita?

Kebudayaan ‘kita’ tidak mengacu pada suatu budaya ataupun komunitas dimana kita dilahirkan. Kebudayaan ‘kita’ mengarah pada budaya yang telah membentuk kita, suatu budaya yang digunakan untuk mengidentifikasi diri kita, bahkan mendefinisikan personalitas kita. Jika kita dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu budaya, berarti kita dipengaruhi secara mendalam oleh isi dan komunal budayanya. Bertumbuh dalam suatu budaya berarti membangun pertalian umum dan mengembangkan rasa solidaritas dengan anggota masyarakat lainnya (Parekh, 2008a, hal. 212).

Lebih lanjut, bagaimana peran individu terhadap kebudayaannya? Individu-individu yang bernaung dalam komunitas budaya tersebut berfungsi sebagai motor penggerak dari kebudayaannya. Sebagai personal, individu-individu tersebut memiliki suatu kapasitas dan dorongan, baik secara intelektual maupun kreatifitas yang mampu disusun dan dimodifikasi untuk mengembangkan kebudayaannya. Individu-individu tersebut memiliki daya pikir dan kekritisannya masing-masing, dan hal ini tidak bisa dikendalikan ataupun diarahkan pada titik tertentu oleh masyarakatnya. Ketidakmampuan ini pada akhirnya membawa setiap individu memiliki kekhasannya masing-masing, sebagai pengaruh dari setiap hal yang menarik bagi mereka secara personal. Tidak tertutup juga kemungkinan adanya individu yang justru tertarik dengan apa yang ada dalam budaya diluar komunitasnya, untuk kemudian mempelajari, menelaah, dan mencari kelebihannya.

Pada tahapan berikutnya, individu yang menemukan apa yang baik yang ada diluar komunitas budaya akan membawa nilai-nilai tersebut sebagai suatu pertimbangan tersendiri bagi budaya asalnya. Fenomena ini akan memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam budaya asalnya akan adanya suatu cara lain untuk melaksanakan kehidupan manusia yang berbudaya. Cara-cara lain tersebut bisa jadi merupakan suatu cara mengatur sesuatu yang sebelumnya tidak terpecahkan oleh komunitas budaya

tersebut, atau memberikan suatu alternatif atas penyelenggaraan sesuatu yang telah berjalan sebelumnya.

Sebagai individu, manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh budaya asalnya, dan tidak juga mampu sepenuhnya terbebas dari kebudayaan tersebut. Manusia bagaimanapun juga mengalami suatu bentukan dari budayanya, namun dengan daya kritisnya, manusia juga mampu memberi pengaruh pada kebudayaan tersebut. Pengaruh dari kita terhadap kebudayaan ataupun pengaruh kebudayaan terhadap kita bisa diberikan dengan porsi yang berbeda. Jika suatu budaya sangat menutup diri atas pengaruh budaya luar, maka budaya tersebut cenderung menjadi sangat berpengaruh terhadap kepribadian maupun kehidupan anggota-anggotanya. Pada perkembangannya, budaya seperti ini akan menjadi jauh lebih homogen. Namun, tetap saja, anggota-anggotanya yang tidak memiliki pengalaman melihat pada budaya lain, memiliki suatu kreatifitas masing-masing untuk berbalik memberikan pengaruh pada budayanya.

Sementara itu, jika suatu budaya mengizinkan anggota-anggotanya untuk lebih mengembangkan daya refleksi kritis mereka, dan memberikan masyarakatnya kesempatan untuk mengenal budaya lain bahkan meragukan budaya sendiri, anggota-anggota komunitas budaya tersebut tidak akan terlalu dipengaruhi oleh budayanya. Mereka lebih leluasa dalam menentukan sejauh mana nilai-nilai kebudayaan asal tersebut mereka ambil, bahkan lebih berkemampuan dalam mengadaptasi nilai-nilai budaya dari luar untuk mereka jalani.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana masing-masing kebudayaan tersebut kemudian berinteraksi untuk saling mempengaruhi dalam satu masyarakat yang majemuk? Perlu disadari bahwa suatu kebudayaan terbentuk tidak semata-mata hasil kreasi komunitas itu sendiri, tetapi juga merupakan hasil dari komunitas lain yang ikut memberi pengaruh pada mereka, memberikan suatu sudut pandang lain tentang bagaimana suatu hal disikapi.<sup>22</sup> Hal ini dapat terjadi melalui berbagai interaksi perdagangan ataupun eksplorasi wilayah, karena saat hal tersebut berlangsung, tidak dapat dihindari kebudayaan pun ikut mengalami suatu ekspansi. Pada masa kontemporer ini, globalisasi lah yang memegang peranan penting dalam ekspansi budaya.

---

<sup>22</sup>“Kebudayaan bukanlah pencapaian komunitas yang bersangkutan sendiri, tetapi juga komunitas lain yang memberikan konteks pada mereka, membentuk sebagian kepercayaan dan praktek, dan menetapkan titik referensi mereka,” (Parekh, 2006, hal. 221)

Pada saat ekspansi budaya tersebut berlangsung, budaya luar yang masuk tidak utuh dibawa, dan kemudian serta-merta diterima menjadi bagian dari budaya setempat. Budaya tersebut pertama-tama mengalami suatu penyederhanaan untuk dapat dibawa menuju belahan dunia lain yang memiliki pemahaman dan sudut pandang berbeda tentang kebudayaan. Bahkan, di belahan dunia yang berbeda tersebut, budaya bisa saja memiliki posisi yang berbeda terhadap masyarakatnya dibanding posisi budaya yang masuk tersebut di komunitas asalnya. Oleh karena itu, budaya luar yang telah mengalami penyederhanaan tersebut kemudian mengalami proses adaptasi dengan budaya setempat. Pada proses ini, budaya tersebut mengalami penyesuaian dengan cara hidup dan penempatan budaya di daerah tersebut. Oleh karena itu, globalisasi dikatakan mendukung terjadinya penyebaran budaya dan terbuka terhadap keberagaman budaya.<sup>23</sup>

### **Merenungkan kembali konsep keberagaman budaya**

Parekh mengungkapkan setidaknya ada empat pendapat yang mendukung keberagaman budaya yang telah ada lebih dulu (Parekh, 2008a, hal. 223). Pendapat tersebut adalah: (1) keanekaragaman budaya meningkatkan pilihan yang ada dan memperluas kebebasan pilihan; (2) keberagaman budaya merupakan hasil dari hak-hak setiap manusia atas kebudayaan mereka; (3) keanekaragaman menciptakan dunia yang kaya secara estetis; dan (4) keanekaragaman mencegah adanya dominasi atas pilihan jalan hidup.

Pendapat yang pertama memiliki poin yang penting dalam keberagaman, namun justru memiliki kelemahan dalam penghargaan terhadap keberagaman itu sendiri. Dengan menempatkan kebudayaan hanya sebagai suatu pilihan, pada akhirnya kita akan mempertanyakan mengapa harus ada sesuatu yang berbeda atau malah bertentangan dengan apa yang kita pilih, apa yang menurut kita terbaik, apa yang menurut kita benar. Seperti dibahas sebelumnya, walaupun kita tidak terdeterminasi oleh budaya kita, kita terbentuk juga olehnya. Dari penalaran ini, terindikasi bahwa pada akhirnya kita akan memilih budaya yang membentuk kita. Saat kita masuk dalam kehidupan bermasyarakat

---

<sup>23</sup> "...globalisasi melibatkan lokalisasi dan paling tidak sejumlah penghargaan dan pengakuan terhadap perbedaan budaya," (parekh, 2006, hal. 222)

dan kemudian menemukan adanya individu-individu yang memilih budaya yang justru bertentangan dengan yang kita pilih, gesekan akan terjadi. Kita akan mulai mempertanyakan pendasaran adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita jalani. Lebih lanjut, pandangan ini pada akhirnya tidak akan memberi tempat pada mereka yang merasa cukup puas pada budayanya sendiri, dan merasa tidak memerlukan adanya budaya lain bagi dirinya sebagai individu. Pada titik ini keberagaman kehilangan maknanya.

Pada pendapat yang kedua, keberagaman justru ditempatkan sebagai implikasi logis dari pemberian hak formal terhadap individu, yaitu pemberian akses terhadap budayanya. Pendapat ini tidak mengetengahkan mengapa seseorang perlu memiliki akses terhadap budayanya, atau mengapa perlu dipertahankan adanya keberagaman budaya. Pendapat ini justru mengeksplorasi bagaimana jadinya saat semua orang memiliki akses terhadap budayanya, atau betapa perlunya seseorang memiliki keanggotaan dalam komunitas budaya. Dengan kata lain, keberagaman menjadi sesuatu yang tidak terelakkan, tidak dimaksudkan, atau bahkan menjadi sebuah keterpaksaan. Pemahaman seperti ini sama sekali tidak dapat menjamin terpeliharanya kebebasan dalam berbudaya, sehingga dengan sendirinya keberagaman mendapat ancaman dari dalam pemahamannya sendiri. Saat sebuah komunitas budaya begitu dominan dan mengarah pada asimilasi atau homogenisasi budaya, mereka yang dalam posisi subordinat akan kekurangan kapasitas untuk mempertahankan kebudayaan mereka. Hal ini hanya bisa diatasi dengan meyakinkan masyarakat bahwa keanekaragaman budaya adalah yang mereka butuhkan untuk tetap berdampingan, bukan kondisi tak terkendali yang muncul karena penempatan hak-hak formal.

Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang diungkapkan oleh Herder, Schiller, dan penganut liberalisme lainnya. Mereka berpendapat bahwa keanekaragaman budaya menciptakan suatu dunia yang kaya, beraneka, dan secara estetis menyenangkan dan memberikan dorongan-dorongan (Parekh, 2008a, hal.225). Pandangan ini benar di satu sisi, namun tidak cukup memberikan alasan perlunya keberagaman dipertahankan dalam suatu masyarakat. Dalam pandangan ini, keanekaragaman dilihat menjadi suatu keindahan karena begitu banyaknya warna yang terkumpul dalam satu wadah institusi sosial yang diwakili oleh setiap komunitas budaya. Namun yang harus ditekankan disini,

keberagaman budaya adalah sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, sehingga untuk mengatakan bahwa hal tersebut diperlukan dan harus dipertahankan dibutuhkan suatu penalaran sosial yang komprehensif. Terutama untuk mereka yang meyakini bahwa homogenitas lebih baik untuk diterapkan, argumen estetis seperti ini tidak akan membuat mereka berpikir perlu memberi tempat pada keberagaman.

Pendapat yang terakhir dijabarkan oleh beberapa pemikir seperti Mill dan Humboldt. Pendapat ini memiliki keterbatasannya sendiri. Sejak mendukung keberagaman untuk mengkompetisikan setiap sistem gagasan dan jalan hidup didalamnya, kebudayaan tersebut dengan sendirinya memiliki suatu kriteria-kriteria tertentu untuk dipenuhi. Hal ini pada akhirnya akan membatasi keluasan dari keberagaman itu sendiri. Pada akhirnya, akan ada kebudayaan-kebudayaan yang tidak masuk akal bagi mayoritas individu, yang akan tersisih dan tidak memiliki kapasitas untuk sekedar memunculkan dirinya. Kondisi seperti ini menghilangkan nilai-nilai intrinsik dari setiap kebudayaan.

Lalu, bagaimana pandangan Parekh sendiri terhadap keberagaman? Ia menekankan bahwa setiap kebudayaan memiliki kapasitas-kapasitasnya sendiri untuk setiap nilai kebaikan dalam diri manusia. Tidak ada satu kebudayaan pun yang mampu mencakup semua nilai kebaikan sekaligus, juga tidak ada satu kebudayaan pun yang tidak memiliki nilai kebaikan didalamnya. Kebudayaan yang berbeda mewakili nilai-nilai kebaikannya masing-masing, dan karena itu tidak ada satu kebudayaan pun pantas dihilangkan begitu saja.

Selain itu, keanekaragaman budaya juga menjadi cerminan kebebasan manusia. Setiap manusia seharusnya memiliki kemampuan untuk keluar dari budaya asalnya, untuk melihat adanya nilai-nilai kebaikan diluar budaya yang membentuknya selama ini. Menjadi suatu persoalan lain kemudian individu tersebut menjalani kebaikan lain itu atau tidak, namun kemampuannya untuk melihat yang diluar kebudayaannya itulah yang mencerminkan kebebasannya. Pada titik ini, Parekh menunjukkan pengaruh Gandhi pada dirinya. Semangat Gandhi untuk mewujudkan kebebasan dalam keberagaman dikonsepsikannya secara nyata.

Kemudian, apakah lantas suatu masyarakat yang memutuskan untuk menjadi homogen kehilangan kebaikannya? Masyarakat yang terbentuk menjadi homogen

memiliki keistimewaannya sendiri. Mereka cenderung lebih mudah untuk disatukan, memiliki jaringan komunikasi yang lebih terorganisir, dan lebih mudah mempertahankan kebudayaannya. Namun, tentu saja masyarakat ini akan menjadi lebih tertutup. Masyarakat yang homogen akan lebih sulit untuk menerima perubahan, karena perbedaan pun tidak mendapat tempat. Kelemahan lainnya, sistem masyarakat yang seperti ini jauh lebih mudah dimobilisasi. Ketiadaan akses bagi kritisisme dalam masyarakat membuat mereka akan kompak untuk berkata ya ataupun tidak pada satu hal. Mungkin pada satu sisi mereka lebih mudah mempertahankan kebudayaannya, namun di sisi lain mereka justru kesulitan mengembangkan budayanya. Kebudayaan mereka akan tetap di titik yang sama, karena daya imajinasi individu pun dikekang. Situasi yang tidak terbiasa dengan dialog seperti ini akan membuat ketegangan begitu mudah muncul saat tiba-tiba ada kreatifitas baru diantara mereka. Terlebih pada masa kontemporer saat ini, saat globalisasi mempermudah masuknya pengaruh eksternal pada suatu komunitas budaya.

### **Keberagaman dalam Multikulturalisme Kontemporer**

Multikulturalisme kontemporer tidak terikat dengan suatu jalan hidup tertentu; yang baik begini, sebaiknya tidak begitu, pun terhadap keberagaman kultural. Multikulturalisme membuka diri terhadap semua jalan hidup yang mungkin diambil setiap individu, termasuk komunitas kultural yang memilih untuk menutup diri terhadap pengaruh luar dan tetap homogen dalam komunitasnya. Jika multikulturalisme mengharuskan setiap komunitasnya yang ada dalam suatu masyarakat membuka diri terhadap keberagaman, dan kemudian mempertimbangkan nilai-nilai baik yang ada diluar dirinya, maka multikulturalisme pun akan terjebak pada monisme (Parekh, 2008a, hal. 233).

Multikulturalisme mengakui ada berbagai cara untuk menjalani kehidupan secara kultural, termasuk untuk menutup diri dari pengaruh luar. Keberadaan suatu komunitas kultural yang menutup diri dari pengaruh budaya luar justru akan semakin memperkaya keberagaman dalam masyarakat tersebut secara keseluruhan.

Lalu, bagaimana kita hidup dalam keberagaman ditengah masyarakat yang bebas untuk menjadi multikultural atau tidak? Penghormatan kebudayaan lain diperlukan disini.

Namun demikian, Parekh menekankan satu hal yang diperhatikan dalam menghormati budaya lain di tengah multikulturalisme. Penghormatan bagi kebudayaan lain untuk menjalankan kebudayaannya tidak absolut dan totaliter. Dalam hal ini, penghormatan terhadap budaya lain tidak berarti pembiaran terhadap budaya lain untuk berlaku sesuka hati.

*“Kita harus menghormati hak komunitas terhadap budayanya, tetapi kita harus merasa bebas untuk mengkritik keyakinan dan praktek-prakteknya,” (Parekh, 2008a, hal. 240)*

Parekh menekankan bahwa pemberian penghormatan pada budaya lain tidak serta-merta diberikan, namun harus melalui suatu pemahaman yang simpatik. Penilaian bahwa mereka layak untuk mendapat penghormatan harus berasal dari kita yang memberikan penilaian dari dalam, sehingga kita menyadarinya adanya suatu hal pada budaya mereka yang patut untuk diberi keleluasaan dalam aplikasinya. Jika tidak demikian, maka perlakuan yang kita berikan akan semena-mena, sesuai apa yang kita lihat dari budaya kita berharga.

Tahap selanjutnya, saat kita berusaha melihat dari dalam dan menemukan ketidakwajaran atau suatu hal yang tidak bisa dibenarkan secara universal, kita tidak kehilangan posisi kita untuk mengkritisasi kebudayaan tersebut. Kewajiban kita adalah menghormati adanya hak bagi budaya lain untuk hidup berdasarkan kebudayaan mereka, namun kita tidak diwajibkan memberikan penghormatan atas bagaimana tata cara kehidupan berdasarkan budaya mereka tersebut dijalankan. Bagaimana hal ini dimungkinkan?

Seperti telah diungkapkan tadi, setiap kebudayaan memiliki dua dimensi, dimensi komunal dan dimensi konten budaya. Penghargaan terhadap komunitas budaya berarti penghargaan terhadap mereka untuk memilih hidup dengan kebudayaan manapun. Hal ini berkaitan dengan hak formal manusia. Sementara itu, penghargaan terhadap budaya merupakan penghargaan terhadap tata cara budaya tersebut dijalankan. Pada dimensi ini, penghargaan yang kita berikan harus dilakukan dengan melihat dari dalam dan menanggalkan imaji kita akan budaya asal kita. Melalui proses ini kita akan melihat suatu kebudayaan layak untuk mendapat penghargaan dalam konten budayanya atau tidak.

*“Secara umum, jika satu komunitas budaya menghormati kelayakan dan martabat manusia, menjaga kepentingan dasar manusia dalam batas-batas sumber dayanya, tidak memberikan ancaman bagi pihak lain dan memperoleh kesetiaan sebagian besar anggotanya, dan karena itu memberikan dasar kondisi hidup yang baik, komunitas tersebut layak dihormati dan dibiarkan sendirian,” (Parekh, 2008a, hal. 239)*

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa bagi Parekh keberagaman itu mutlak diperlukan dalam multikulturalisme kontemporer. Akan tetapi, penempatan keberagaman tersebut tidak membuat individu-individu dalam komunitas kultural dapat bertindak semaunya atas nama kebebasan berbudaya. Penghargaan atas budaya lain juga harus didasarkan pada simpatik intelektual dari komunitas kultural lainnya. Dengan demikian, diharapkan kesatuan diantara komunitas-komunitas kultural dapat terwujud. Namun, bentuk pemerintahan yang seperti apakah yang mampu mengakomodasi tuntutan-tuntutan dari multikulturalisme kontemporer ini? Pembahasan akan bentuk pemerintahan yang ideal menurut Parekh akan dibahas pada bab selanjutnya.



## **BAB IV**

### **STRUKTUR POLITIK BAGI MULTIKULTURALISME KONTEMPORER**

Pada bab ini akan dibahas bagaimana Bhikhu Parekh merumuskan struktur politik yang mampu memberi tempat pada kesatuan dan keberagaman, untuk bertumbuh bersama dalam multikulturalisme kontemporer.

#### **IV. 1. Bentuk-bentuk Integrasi Politik**

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, masyarakat multikulturalis kontemporer—disebut multikulturalis karena diajukan oleh mereka yang menginginkan untuk hidup dalam atmosfer multikultural—menuntut adanya dua hal yang harus dipenuhi sekaligus dalam iklim politik mereka. Mereka menginginkan suatu iklim politik yang mampu meningkatkan rasa persatuan diantara mereka. Hal ini diperlukan untuk menciptakan kolektifitas diantara setiap komunitas multikultural, untuk memampukan mereka menyelesaikan permasalahan kultural antar komunitas tersebut.

Pada saat yang bersamaan, keberagaman yang menjadi fakta awal kondisi ini, yang kemudian mempertemukan mereka dalam satu masyarakat bersama, juga perlu mendapatkan jaminan atas kelestariannya. Keberagaman ini begitu penting untuk dipertahankan bagi komunitas-komunitas kultural, karena penghormatan atas kultur mereka menjadi bagian dari penghormatan atas keberadaan mereka. Persoalannya kemudian, struktur politik yang bagaimanakah yang berbicara mengenai kedua hal ini, sekaligus memberi tempat bagi keduanya?

Bhikhu Parekh mempertimbangkan empat bentuk integrasi politik yang membahas pertemuan antara kesatuan dan keberagaman ini (Parekh, 2008a bab 7). Keempat integrasi politik itu adalah: (1) Asimilasi; (2) Proseduralis; (3) Asimilasi kemasyarakatan; dan (4) Millet.

##### **1. Asimilasi**

Kelompok asimilasionis mencita-citakan terwujudnya suatu negara atas satu bangsa. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan negaranya tidak akan berjalan baik

secara kultural jika tidak tercipta suatu kebudayaan nasional. Dengan ini, seluruh masyarakat yang bernaung di negara tersebut memiliki satu pemahaman akan moralitas, nilai-nilai kebaikan, bahkan pandangan hidup yang seharusnya dijalani. Negara sebagai penyelenggara pemerintahan berkewajiban memastikan setiap budaya yang ada dalam masyarakatnya melebur menjadi satu kebudayaan nasional. Dengan demikian, jelas bahwa kebudayaan minoritas berada dalam tuntutan untuk menyesuaikan dan meleburkan diri dalam kebudayaan mayoritas untuk mewujudkan kebudayaan nasional tersebut. Penolakan atau perlawanan dari kebudayaan minoritas akan berakibat pemakluman diskriminasi atas mereka.

Kemudian, apakah dengan asimilasi persoalan dalam multikulturalisme kontemporer teratasi? Ada beberapa hal yang membuat asimilasi tidak semudah itu menjamin keberhasilannya menuju jalan keluar yang mereka cita-citakan. Yang pertama, seperti yang pernah dibahas pada bab sebelumnya, kebudayaan walaupun tidak mendiskriminasi manusia, namun membentuk manusia tersebut. Sesuatu yang membentuk kemanusiaan manusia seperti kebudayaan tentunya tidak semudah itu dihilangkan atau diganti begitu saja dengan kebudayaan baru—kebudayaan nasional—walaupun mengatasnamakan kesatuan. Kondisi ini pada akhirnya sangat memungkinkan memunculkan perlawanan, bahkan rentan konflik.

Persoalan yang kedua, pilihan untuk berasimilasi yang mungkin saja diambil oleh individu-individu atau bahkan komunitas-komunitas kultural yang minoritas, tidak serta merta menjamin mereka untuk terlepas dari perlakuan diskriminatif oleh komunitas mayoritas. Bagaimanapun juga, akan tetap ada perbedaan-perbedaan kultural sebagai bawaan dari budaya lama mereka. Contohnya saja, berasimilasi tidak akan membuat komunitas kultural tersebut secara biologis menjadi sama dengan komunitas mayoritas. Hal-hal seperti ini membuat komunitas minoritas tetap memiliki ancaman diskriminasi terkait masa lalunya.

## 2. Proseduralis

Berbeda dengan kaum asimilasionis, kaum proseduralis justru berpendapat bahwa keberagaman sosial dan budaya pada masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja. Jalan keluar untuk kondisi ini juga tidak dapat dirumuskan begitu saja. Satu-satunya yang bisa

dilakukan adalah menjamin terjaganya kedamaian dan kestabilan di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan peran ini, posisi pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat sentral. Masyarakat tersebut harus segera merumuskan bentuk dan struktur pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan yang netral dan formal, yang kepada merekalah tanggung jawab menjaga perdamaian dan kestabilan ini mampu diserahkan. Pemerintahan tersebut harus mengkombinasikan semaksimal mungkin kesatuan politik, dengan merangkul sebanyak mungkin keberagaman budaya.

Pada akhirnya, kaum proseduralis mengabaikan beberapa hal mendasar dalam pembentukan pemerintahan yang mereka maksud. Pertama, sebagai masyarakat yang terbentuk sebagai komunitas dari komunitas-komunitas kultural yang begitu beraneka ragam, merumuskan untuk kemudian menemukan kata sepakat tentang struktur dan isi pemerintahan bukanlah hal semudah itu. Struktur kekuasaan yang menjadi kondisi prasyarat dalam pandangan ini, bukanlah sesuatu yang instrumental belaka. Perlu suatu dialog dan mekanisme penggodokan landasan bagi struktur tersebut, dan proses ini pada akhirnya bisa memilih pandangan yang mana pun sebagai jawabannya. Mungkin kita bisa menyerahkan ini pada pandangan yang lebih mayoritas melalui suatu pemungutan suara, tetapi sekali lagi harus disadari bahwa suara mayoritas bukanlah suara universal.

Yang kedua, pembentukan negara yang netral secara moral dan budaya pada dasarnya tidak dimungkinkan. Negara yang nantinya membatasi, menentukan, dan bahkan mengawasi tindak-tanduk masyarakatnya, perlu memiliki putusan-putusan hukum atas hal-hal yang menyangkut relasi antar individu maupun antar komunitas. Putusan-putusan hukum itu sendiri pada akhirnya membutuhkan pendirian moral sehingga negara mampu bertindak tegas dalam menjatuhkan putusan dengan berlandaskan moralitas tersebut. Selama struktur kekuasaan tidak mampu netral secara moral, pendirian pendirian negara tidak bisa didasarkan pada pandangan prosedural tersebut. Hal ini merupakan implikasi logis dari tidak mampunya negara menjadi senetral yang mereka bayangkan, yang kemudian menggambarkan ketidakmampuan negara menjamin alokasi ruang kebebasan dalam keberagaman.

### 3. Asimilasionis kemasyarakatan

Pandangan ini mengambil jalan tengah antara asimilasionis dengan proseduralis. Mereka mencoba memperbaiki pandangan proseduralis dengan menyatakan bahwa selain struktur kekuasaan, masyarakat yang terbangun dari komunitas-komunitas kultural tersebut juga membutuhkan suatu persetujuan tentang kebudayaan yang dimiliki bersama-sama. Akan tetapi, hal ini tidak membuat mereka terjebak dalam asimilasi. Bagi kaum asimilasionis kemasyarakatan, kebudayaan tersebut tidak harus komprehensif dan mencakup seluruh bidang kehidupan (Parekh, 2008a, hal. 268).

Mereka berpendapat pentingnya komunitas-komunitas kultural tersebut memiliki suatu budaya bersama sebagai suatu prasyarat, yang kemudian memungkinkan mereka untuk memiliki suatu dialog yang bermanfaat. Budaya yang dimaksud kaum ini adalah budaya politik, termasuk di dalamnya nilai-nilai politik, cita-cita, praktek-praktek, serta institusi-institusi yang menjadi wadah bagi akses-akses politik mereka bersama. Singkatnya, bagi kaum ini, keberagaman berada di ranah privat dan keseragaman diperlukan untuk ada di ranah publik.

Walaupun dibentuk dengan menghindari kesalahan dua pandangan sebelumnya, asimilasionis kemasyarakatan juga mengalami permasalahan-permasalahannya sendiri. Permasalahan yang pertama, pemisahan yang begitu nyata antara ranah publik dan privat membuat kerancuan posisi bagi lembaga-lembaga yang tidak memposisikan diri pada salah satunya. Institusi seperti sekolah, yang mendapat kurikulum dari negara untuk kemudian menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidik bagi setiap anak didiknya mengalami kerancuan. Sebagai institusi yang tunduk pada negara, sekolah bisa menjadi tempat yang mengabaikan pilihan-pilihan kebudayaan warisan orang tua.

Agama juga mengalami kondisi yang sama disini. Sebagai personal yang beragama, setiap individu tidak dapat terhindarkan untuk bersikap di tengah masyarakat seperti apa yang diajarkan dalam agamanya. Kondisi pemisahan ranah publik dan privat pada titik ini akan membuat seorang asimilasionis kemasyarakatan dalam dilema (Parekh, 2008a, hal. 273).

Permasalahan yang kedua muncul dari budaya politik yang dibagi bersama antar komunitas multikultural. Khusus pada hal ini, kaum minoritas yang telah merasakan kebebasan dalam mengakses dan menjalankan budayanya dituntut untuk menerima

budaya politik dari mereka yang lebih mayoritas. Hal ini mengabaikan fakta historis bagaimana budaya politik dari kaum mayoritas tersebut terbentuk, yaitu melalui suatu konsensus politik yang berlangsung pada rentang waktu tertentu. Selain itu, pemaksaan pengangkatan budaya politik mayoritas sebagai budaya politik bersama mengabaikan peran-peran kaum minoritas dalam bias-bias politik yang ada dalam budaya politik kaum mayoritas, yang muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian sejarah politik mereka.

Permasalahan yang ketiga, pembatasan akses budaya minoritas hanya pada ranah privat, termasuk didalamnya bahasa, adat, dan cara bicara, pada akhirnya akan membuat komunitas kultur minor mengalami ketertekanan. Sebagian dari komunitas kultural minoritas tersebut akan terdeterminasi dan memilih untuk tidak menunjukkan identitas kulturalnya di hadapan publik. Sebagian lainnya akan merasakan ini sebagai suatu ketidakadilan.

#### 4. *Millet*

Pandangan yang ini justru berpendapat bahwa negara bukan suatu komunitas dari komunitas-komunitas kultural yang ada di dalamnya, karena kondisi tersebut mengimplikasikan adanya suatu dasar moralitas yang independen. Kaum *millet* memandang negara sebagai sebuah kesatuan yang longgar, di mana komunitas-komunitas tersebut bebas mengikuti jalan hidup kulturalnya masing-masing. Negara harus dibebaskan dari urusan-urusan internal dan kemudian melembagakan otonomi warganya (Parekh, 2008a, hal. 269).

Sekalipun demikian, model *millet* pun memiliki keberatannya sendiri. Dengan melepaskan masyarakat begitu otonom dalam menjalankan kebudayaannya, tahap perkembangan kehidupan sosial politik yang mensyaratkan interaksi antar komunitas kultural menjadi terhambat.

Secara garis besar, keempat bentuk integrasi politik tersebut memiliki kelemahannya masing-masing, yang membuat keanekaragaman dan kesatuan tidak dapat terjamin kelangsungannya secara sekaligus. Teori asimilasi tidak memperhatikan tuntutan keanekaragaman, dan teori *millet* justru mengabaikan penyatuan. Teori proseduralis dan asimilasionis kemasyarakatan memperhatikan kedua tuntutan ini, namun gagal memberi

tempat bagi interaksi dialogis yang seharusnya ada diantara keduanya. Interaksi dialogis ini diperlukan untuk menyeimbangkan porsi dan alokasi atas kesatuan dan keberagaman.

Singkatnya, bentuk-bentuk integrasi politik dan problem-problemnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. asimilasi

- a) Kebudayaan nasional mengancam kebudayaan lokal
- b) Kebudayaan nasional tidak menjamin hilangnya diskriminasi kultural

2. proseduralis

- a) Terlalu menyederhanakan proses pembentukan kesepakatan tentang struktur pemerintahan
- b) Negara yang netral secara moral dan budaya tidak dimungkinkan

3. asimilasionis kemasyarakatan

- a) Pemisahan ranah publik dan privat tidak bisa begitu saja terjadi pada semua institusi
- b) Keseragaman pada ranah publik menekan identitas kultural
- c) Keseragaman pada ranah publik juga mematikan akses politik kaum minor

4. *millet*

Otonomi yang terlalu luas justru menghambat perkembangan dialogis antar komunitas budaya.

#### **IV. 2. Prinsip-prinsip Pembentukan Struktur Politik Multikultur**

Pada akhirnya Parekh berusaha merumuskan prinsip-prinsip umum (Parekh, 2008a, hal. 276) yang perlu diperhatikan dalam menentukan struktur politik yang lebih cocok untuk masyarakat dengan keberagaman multikultural tinggi. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas: (1) struktur kekuasaan yang menjamin kebersamaan antar komunitas kultural; (2) keadilan bagi setiap komunitas kultural; (3) perlindungan terhadap hak-hak kolektif; (4) pemberian tempat bagi bertumbuhnya kebudayaan umum; (5) pendidikan multikultural; dan (6) perumusan identitas nasional.

## 1. Struktur kekuasaan

Untuk menjalankan kehidupan sosial budaya secara bersama-sama antar komunitas kultural yang beragam, diperlukan suatu iklim yang kondusif diantara mereka. Perwujudan iklim sosial yang mendukung interaksi dan dialog antar komunitas tersebut sangat bergantung pada struktur politik yang menjalankan wewenang kekuasaan. Struktur politik tersebut harus mampu menciptakan perdamaian antar komunitas, dengan menjamin distribusi hak-hak dasar dan akses politik. Ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang dijalankan harus bisa diterima oleh semua konstituennya, sehingga setiap individu yang tergabung di dalamnya merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan negaranya.

## 2. Keadilan bagi setiap komunitas kultural

Negara menempati posisi yang utama dalam menjamin keadilan bagi setiap warganya, baik secara individu maupun kolektif. Untuk menjalankan posisinya ini, negara perlu menjamin warganya untuk mendapatkan kesetaraan dalam seluruh bidang kehidupan. Kesetaraan sendiri dibagi dalam dua macam, yaitu kesetaraan negatif dan kesetaraan positif. Kesetaraan negatif merupakan bentuk keterlepasan setiap warga negara dari diskriminasi, baik diskriminasi langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi saat pengambilan putusan diwarnai oleh prasangka-prasangka tertentu terhadap komunitas lain. Diskriminasi tidak langsung terjadi bila peraturan-peraturan yang ada mengandung suatu bias-bias diskriminatif yang merugikan komunitas tertentu.

Berbeda dengan kesetaraan negatif, kesetaraan positif lebih menitikberatkan pada kesetaraan antara hak dan kewajiban. Dengan pelimpahan kewajiban yang setingkat, warga negara berhak mendapatkan hak yang setingkat juga. Hak yang dimaksud tidak hanya hak-hak politik dan ekonomi, namun juga hak-hak budaya. Setiap lapisan masyarakat harus memiliki hak yang sama luasnya untuk mengakses budayanya, untuk mengekspresikan, mempertahankan, dan menanamkan nilai-nilai budayanya. Selain itu, semua warga negara sebagai

bagian dari komunitas kultural harus mendapatkan kesempatan yang sama, untuk berperan dan bermanfaat bagi perkembangan masyarakatnya.

Untuk mempermudah pengawasan dan alokasi hak-hak kebudayaan, diperlukan adanya desentralisasi kekuasaan. Dengan menggunakan desentralisasi, pengawasan dan pengaturan hak budaya tiap komunitas lebih bisa disesuaikan dengan kondisi setiap daerah. Untuk menjamin bahwa distribusi hak tersebut tidak mengancam integrasi, perlu dijaga koordinasi antara pemerintah-pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, diharapkan kesatuan bisa tetap terjaga tanpa mengancam alokasi hak-hak budaya setiap warga negara.

### 3. Hak-hak kolektif

Hak-hak kolektif terdiri dari hak kolektif primer dan hak kolektif derivatif. Hak kolektif primer diperoleh suatu komunitas sebagai hak khusus untuk komunitas tersebut. Sedangkan hak kolektif derivatif diterima setiap anggota suatu komunitas karena setiap anggota-anggota kelompok tersebut mengumpulkan hak-haknya menjadi sebuah hak kelompok.

Dari penggunaannya, hak kolektif primer diklaim secara personal oleh anggota kelompok tersebut. Sedangkan hak kolektif primer dapat dijalankan secara individu oleh anggota kelompok dan dapat juga dijalankan secara kolektif. Untuk mengklaim hak-hak kolektif, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi (Parekh, 2008a, hal. 289), yaitu:

- Hak tersebut merupakan persetujuan anggota-anggotanya;
- Keberadaannya merupakan kepentingan mendasar yang vital bagi para pengikutnya;
- Adanya jaminan keamanan bagi visi-visi hidup kaum minoritas;
- Hak tersebut merupakan pengangkatan derajat masyarakat yang telah lama dijadikan objek penindasan;
- Perlindungan identitas dan kekhasan suatu komunitas kultural untuk memungkinkan mereka berkontribusi bagi masyarakat yang lebih luas;



- Pemberian hak tersebut, walaupun membatasi kebebasan individu lainnya, diberikan kepada komunitas yang berperan sebagai pemelihara doktrin-doktrin tertentu.

#### 4. Kebudayaan umum

Dalam masyarakat multikultural, pertemuan kebudayaan yang dibawa oleh masing-masing komunitas merupakan hal yang tak terelakkan. Melalui pertemuan tersebut, masing-masing komunitas memperkenalkan budaya, adat, dan nilai-nilai kebaikan hidupnya pada komunitas lain, dan begitu juga sebaliknya. Kondisi ini membuat dialog antar budaya menjadi sesuatu yang terjadi begitu saja dalam keseharian.

Berawal dari dialog antar budaya tersebut, usaha penelitian dan pemahaman akan apa yang baik menurut komunitas lain, apa yang begitu dasariah bagi individu lain, serta apa yang membuat komunitas yang satu memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh komunitas lainnya, memasuki tahapan baru. Disadari atau tidak, usaha pembelajaran tersebut membawa perubahan terhadap budaya asal suatu komunitas. Besar pengaruhnya sangat variatif. Lebih jauh lagi, ruang pertemuan antara dua budaya atau lebih berpeluang melahirkan nilai-nilai baru, visi hidup baru, bahkan keyakinan baru. Dengan kata lain, pertemuan antar budaya bawaan ini berpeluang menghadirkan suatu kebudayaan baru, kebudayaan yang lebih umum.

Berbeda dengan kebudayaan nasional yang diciptakan untuk menyatukan keberagaman, budaya umum ini justru tercipta bukan karena keterpaksaan, namun lebih natural dan spontan. Untuk mendukung terwujudnya kebudayaan seperti, perlu difasilitasi dengan memberi ruang yang cukup luas bagi interaksi antar budaya. Pemerintah disini berperan penting untuk menjamin bahwa proses interaksi tersebut berjalan dalam alam kesetaraan (Parekh, 2008a, hal. 295).

#### 5. Pendidikan multikultural

Pendidikan multikultural disini berperan untuk menjaga dan melestarikan semangat kesetaraan, toleransi, dan kesadaran untuk membuka diri terhadap

keberagaman. Pendidikan multikultural ini penting untuk memperbaiki kegagalan kurikulum pendidikan sekarang yang lebih bersifat monokultur. Keterbatasan yang ada pada pendidikan monokultur adalah (Parekh, 2008a, hal. 300): (1) pendidikan monokultur tidak membangkitkan keingintahuan intelektual terhadap kebudayaan lain; (2) pendidikan monokultur menghambat pertumbuhan kemampuan-kemampuan kritis para murid; (3) pendidikan monokultur cenderung membangkitkan arogansi, ketidakpekaan, dan rasisme.

Kemudian, bagaimana kurikulum bagi pendidikan multikultural seharusnya? Pendidikan multikultural setidaknya harus mencakup dua syarat (Parekh, 2008a, hal. 302): (1) representatif; (2) dialogis. Pendidikan yang representatif maksudnya harus terbuka pada perwakilan dari banyak hal. Memang tidak ada satupun kurikulum yang mampu merangkum semua hal di dunia ini. Namun idealnya, kurikulum pendidikan multikultural harus mampu melihat banyak hal di dunia ini dengan menghadirkan perwakilan-perwakilan utama dari setiap pokok permasalahan, bukan menyederhanakan permasalahan dengan menghadirkan sebuah finalisasi.

Yang kedua, pendidikan multikultural harus bersifat dialogis dalam mencari pemecahan atas setiap permasalahan. Pendidikan multikultural berarti pendidikan akan kebebasan, yang berarti juga harus menghadirkan iklim kebebasan tersebut dalam ruang pembelajaran. Kebebasan yang berusaha ditekankan disini adalah kebebasan bagi setiap pembelajar untuk mengambil sebuah referensi, sudut pandang, bahkan membebaskan setiap dari mereka untuk mengkritik pemikiran-pemikiran yang berkembang di antara mereka. Dengan membiasakan diri untuk melihat individu lain menggunakan pendasaran pemikiran yang berbeda, berada dalam posisi sisi positif dan negatif berbeda, hingga membiasakan diri untuk mengkritik dan dikritik, para pembelajar ini akan siap saat menemui realita yang ada di kehidupan nyata nantinya.

## 6. Identitas nasional

Perlu tidaknya identitas nasional dibentuk memang sangat dipengaruhi oleh sisi positif dan negatif yang muncul dari konsep ini. Identitas nasional

diperlukan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakatnya membentuk citra-diri kolektif, untuk kemudian mengembangkan suatu nilai-nilai hidup yang mampu diterima oleh semua. Selain itu, dengan adanya identitas nasional, akan lebih mudah secara politis untuk menggerakkan masyarakat multikultural tersebut membentuk suatu moralitas bersama.

Akan tetapi, identitas politik juga memiliki sisi negatif yang sulit dihindari. Untuk memudahkan pendefinisian dari identitas nasional tersebut, komunitas politik akan menyetujui pemikiran yang satu dan meminggirkan yang lain. Saat identitas politik telah terdefiniskan, bukan tidak mungkin akan terjadi penutupan suara ketidakpuasan dari beberapa komunitas, dengan mengatasnamakan identitas nasional.

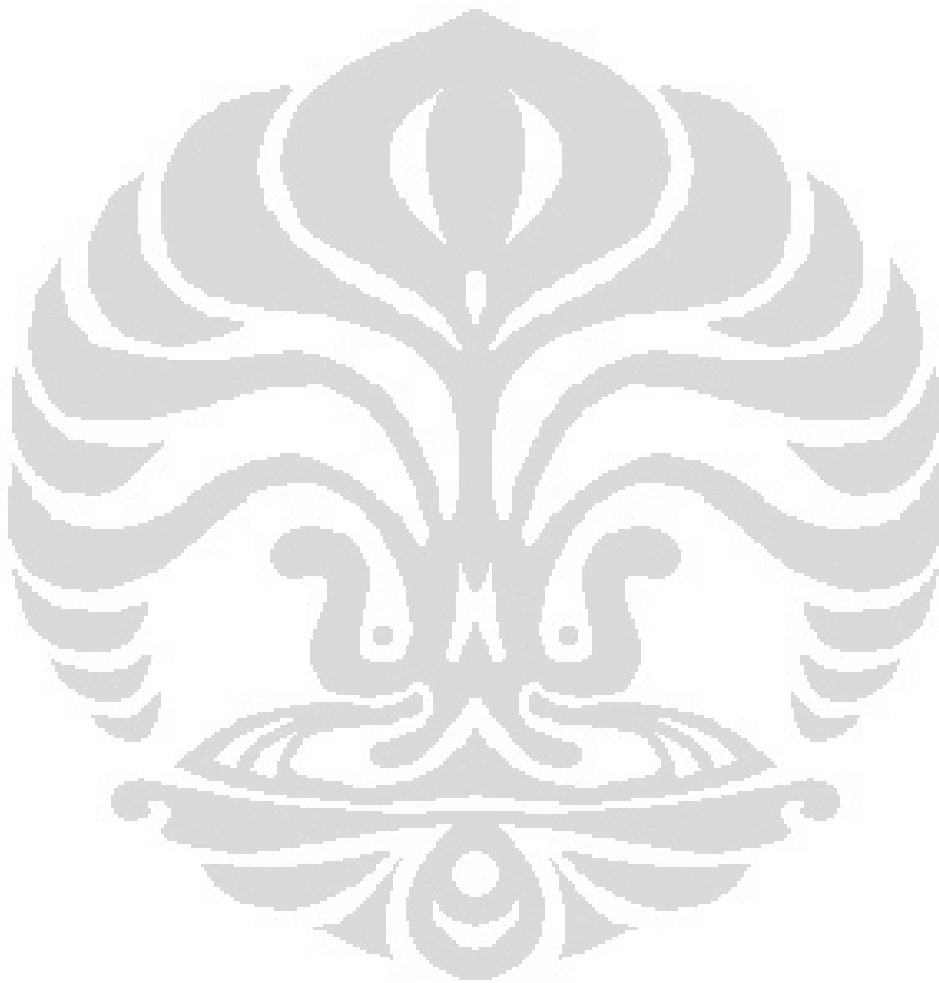
Jika identitas nasional memang diperlukan maka setidaknya harus memenuhi kriteria-kriteria berikut (Parekh, 2008a, hal. 307):

- Identitas nasional harus ditempatkan dalam apa yang dimiliki seluruh anggotanya secara publik;
- Identitas nasional ditujukan untuk mengatasi persoalan tumpang tindih identitas kultural yang dimiliki beberapa individu, seperti identitas ras dan agama;
- Identitas nasional harus didefinisikan untuk memungkinkan semua warga negaranya tercakup dan mampu menyatu di dalamnya. Dalam hal ini tidak ada komunitas minoritas yang merasa sebagai pihak asing dalam identitas nasional;
- Identitas nasional harus bisa dirasakan dimiliki oleh semua komunitas kultural. Identitas nasional tidak bisa dibenarkan bila sementara memberi hak pada minoritas namun pendefinisian identitas nasionalnya merupakan apa yang dimiliki kaum mayoritas.

Dari kriteria-kriteria tersebut, nyata bahwa pendefinisian identitas nasional merupakan sesuatu yang tidak mudah itu dijalankan. Proyek ini memerlukan pendefinisian yang sangat representatif dan membutuhkan rekonsiliasi dalam interaksi antar komunitas kultural.

Dari deskripsi diatas, nyata bahwa pada dasarnya struktur politik masyarakat multikultural dibentuk untuk menjamin tiga hal, yaitu: (1) keadilan; (2) kebudayaan

kolektif majemuk; dan (3) identitas nasional. Dengan adanya keadilan yang menjamin semua individu dalam setiap komunitas kultural terakomodir haknya, kebudayaan kolektif yang menjadi sarana setiap individu berperan bagi negara, dan identitas nasional yang menjadi alasan adanya rasa memiliki terhadap komunitasnya, masyarakat dalam multikulturalis kontemporer tidak memiliki alasan untuk kecewa terhadap pemerintahan mereka.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini, dengan menyimpulkan data-data yang telah dijabarkan pada bab 1 hingga bab 4, disertai refleksi kritis dengan mengambil Indonesia sebagai objek refleksi.

#### **V.1. Kesimpulan**

Melalui apa yang telah kita lihat dari bab-bab sebelumnya, jelas bahwa melalui buku ini Bhikhu Parekh ingin merubah pandangan-pandangan umum yang telah ada tentang multikulturalisme. Parekh melakukannya dengan melakukan perbandingan kehidupan multikultural dari masa ke masa, menetapkan bagaimana kondisi masa kini, untuk kemudian merumuskan kembali makna multikulturalisme yang sesuai serta bagaimana cara menyikapinya.

Parekh menegaskan bahwa multikulturalisme bukanlah suatu ideologi, doktrin politik, ataupun teori filosofis. Multikulturalisme lebih kepada suatu perspektif tentang kehidupan kultural yang sangat beragam dalam satu wadah kemasyarakatan. Perspektif ini memiliki tiga wawasan utama:

- Pertama, manusia dibentuk oleh latar belakang kulturalnya, meskipun tidak terdeterminasi olehnya. Kemampuan manusia untuk mengevaluasi kebudayaannya dan kebudayaannya di sekitarnya memungkinkan manusia untuk itu.
- Kedua, setiap kebudayaan memiliki jalan hidup yang baik. Tidak ada satupun budaya yang memiliki semua nilai kebaikan, dan sebaliknya, tidak ada satupun yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Hal ini penting untuk disadari, sehingga setiap komunitas kultural tidak memaksakan keterbatasan budayanya pada orang lain.
- Setiap budaya adalah plural dalam dirinya, dan terbentuk sebagai hasil dialogis setiap anggota komunitas di dalamnya.

Dari perspektif ini, jelas bahwa Parekh menekankan tiga unsur yang utama dalam multikulturalisme, yaitu keterlekatan kultural, dialog interkultural, dan pluralitas intern kultural. Perspektif ini terbentuk secara dialogis, dan perhatian utamanya adalah bagaimana mempertahankan iklim dialogis ini secara terus-menerus, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkannya mampu diterima secara kolektif.

Beranjak memasuki multikulturalisme kontemporer, Parekh menunjukkan adanya tantangan yang tidak dialami oleh masyarakat multikultural sebelumnya, yaitu mewujudkan masyarakat yang bersatu dalam keberagaman, mempertahankan keberagaman dalam kesatuan. Kedua hal ini menjadi tuntutan tersendiri yang harus dipenuhi dalam multikulturalisme kontemporer. Untuk bisa menyatukan kesatuan dan keberagaman, diperlukan suatu struktur politik yang mampu mewedahi dengan proporsi dan ukuran yang tepat. Proporsi tersebut meliputi:

- Masyarakat multikultural harus memberikan ruang politik dan budaya bagi para konstituennya, untuk kemudian memenagkan kesetiaan mereka. Penghargaan atas kesetaraan menjadi prasyaratnya.
- Hubungan antar komunitas dibentuk oleh 3 faktor utama yang harus diperhatikan pemerintah, yaitu: (1) kebutuhan material; (2) akses politik bagi kaum minor; dan (3) rekonsiliasi historis.
- Pemerintah harus mencari cara untuk mencairkan tekanan etnis, agama, dan budaya. Hal ini penting dilakukan jika memang pemerintah ingin merumuskan identitas nasional.
- Pendidikan multikultural harus ditingkatkan untuk membuat masyarakat tidak memandang perbedaan sebagai ancaman.
- Eksklusivitas harus dihapuskan untuk meningkatkan nasionalisme.

Walaupun demikian, sekali lagi perlu ditekankan bahwa multikulturalisme bukanlah suatu kumpulan pikiran yang homogen. Multikulturalisme juga bukan suatu doktrin politik yang substantif, yang meletakkan tujuan politik dan struktur kelembagaan sebagai perspektif filosofis yang menggambarkan inspirasinya dari berbagai sumber (Parekh, 2008a, hal. 456). Multikulturalisme bukan suatu pandangan yang universal, ataupun

relatif. **Multikulturalisme** adalah suatu pandangan **universalisme yang pluralis** (Parekh, 2008a, hal. 469).

Oleh karena itu, tidak dapat diterima bahwa penyelenggaraan suatu kekuasaan dalam pemerintahan mengatasnamakan multikulturalisme dalam agenda politiknya.

## **V. 2. Refleksi kritis**

Berkaca dari pandangan Parekh tersebut, Indonesia sebagai negara yang multikultural memiliki banyak hal yang harus dibenahi jika memang ingin mempertahankan kesatuan dan keberagamannya sekaligus. Hendaknya saat memutuskan untuk mengambil perspektif multikulturalisme, putusan tersebut diambil dengan kesiapan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Seperti yang dijelaskan Parekh, pembenahan kehidupan multikultur melibatkan keempat bidang tersebut, bahkan rekonsiliasi historis menjadi salah satu syarat yang harus diperhatikan.

Seperti dijelaskan sebelumnya, setidaknya ada beberapa prakondisi yang harus diwujudkan untuk menghadirkan struktur politik yang menerima multikulturalisme kontemporer, yaitu: (1) struktur kekuasaan yang menjamin kebersamaan antar komunitas kultural; (2) keadilan bagi setiap komunitas kultural; (3) perlindungan terhadap hak-hak kolektif; (4) pemberian tempat bagi bertumbuhnya kebudayaan umum; (5) pendidikan multikultural; dan (6) perumusan identitas nasional.

Sementara itu, jika kita berkaca pada apa yang kita miliki sekarang, maka hamper semua prakondisi tersebut belum terpenuhi. Pertama, struktur kekuasaan yang ada sekarang belum menciptakan iklim dialogis antar budaya. Dialog lintas budaya yang kerap muncul semata-mata merupakan inisiatif komunitas-komunitas kultural itu sendiri. Kedua, desentralisasi kekuasaan yang menjamin alokasi hak budaya yang disesuaikan dengan budaya masing-masing masih terbatas pada daerah-daerah tertentu. Ketiga, hak-hak kolektif justru menjadi sesuatu yang paling dipertanyakan. Adanya beberapa insiden seperti pembakaran gereja, pembantaian terhadap suku pendatang di Kalimantan, dan beberapa kasus kultural lainnya, menunjukkan bahwa jaminan atas hak kolektif masih sangat minim.

Syarat yang keempat, yaitu adanya kebudayaan umum yang terbentuk dari dialog tidak mungkin terwujud jika pemberian ruang untuk dialog itu sendiri sangat terbatas. Kebudayaan yang baru muncul hanya menjadi suatu kebudayaan yang bentukan saja. Syarat yang kelima menjadi problem tersendiri. Pendidikan berkurikulum multikulturalisme sekali lagi membutuhkan pembukaan diri dari institusi-institusi akademiknya terhadap perbedaan, untuk kemudian mengajarkan bagaimana hidup dalam keberagaman kepada setiap anak didiknya. Tanpa keteladanan sikap dan mental dari para pendidik, menjadi sesuatu yang sia-sia memasukkan multikulturalisme ke dalam kurikulum.

Syarat yang terakhir, yaitu identitas nasional, dapat terwujud jika segala unsur-unsur yang dimiliki secara bersama oleh setiap komunitas kultural mampu dirumuskan, untuk kemudian dicakup bersama menjadi suatu identitas milik bersama. Identitas ini tidak dapat diklaim hanya oleh sebagian masyarakat, atau mampu mengakomodir aspirasi hanya beberapa komunitas kultural. Kondisi ini yang masih harus dikaji untuk mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki identitas nasional.

Di sebuah negara yang memiliki "*Bhinneka Tunggal Ika*" sebagai sembojannya, seharusnya permasalahan kultural seperti yang dialami negara-negara multikultural lainnya tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut. Namun, apa yang terjadi justru menunjukkan kecenderungan yang lain. Kasus GAM, RMS, ataupun teriakan kemerdekaan dari Papua Barat menghadirkan kekawatiran tersendiri. Bahkan Parekh ikut mengomentari Indonesia sebagai negara multikultural yang memperlihatkan tanda-tanda disintegrasi bangsa ( Parekh, 2008a, hal. 450).

Agaknya, Indonesia memang belum siap untuk menjadi negara yang multikulturalis, atau hanya belum siap untuk memenuhi segala persyaratan menjalani kehidupan sebagai bangsa yang multikulturalis.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Bromell, David. (2008) *Ethnicity, Identity, and Public Policy*. Wellington, Institute of policy Studies.
- Parekh, Bhikhu. (2000) *Rethinking Multiculturalism*. New York, Palgrave Macmillan.
- (2001) *Gandhi, A Very Short Introduction*. Oxford, University Press.
- (2007) *European Liberalism and The Muslim Question*. Amsterdam, University Press.
- (2008a) *Rethinking Multiculturalism*. Trans. Bambang Kukuh Adi. Yogyakarta, Kanisius. Trans. of *Rethinking Multiculturalism* (2006).
- (2008b) *A New Politics of Identity*. New York, Palgrave Macmillan.
- Schuck, Christoph dan Bob Sugeng Hadiwinata. (2010) *Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktik*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Taylor, Charles. (1994) *Examining The Politics of Recognition*. New Jersey, Princeton University Press

### Publikasi Elektronik:

- Hughes, Jane. (13 Oktober 2010) *A Lord With A Rainbow Nation*  
(<http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storyCode=159231&sectioncode=26>)
- Freeman, Michael. (9 Juli 2003) *Lord Parekh of Kingston Upon Hall*  
([http://www.essex.ac.uk/honorary\\_graduates/or/2003/bhikhu-parekh-oration.aspx](http://www.essex.ac.uk/honorary_graduates/or/2003/bhikhu-parekh-oration.aspx))
- Patnistik, Egidius. (18 Oktober 2010) *Multikulturalisme Telah Gagal di Jerman*  
(<http://internasional.kompas.com/read/2010/10/18/08194798/Multikulturalisme.Telah.Gagal.di.Jerman>)
- Paxton, George. (19 Januari 2011) *What Would A Gandhian Society Look Like?*  
(<http://gandhifoundation.org/2011/01/19/what-would-a-gandhian-society-look-like-by-george-paxton>)
- Sellars, Mary Ann. *Gandhi: A New Vision for A New World Order*  
(<http://www.thomehfang.com/sunbrates2/4Sellars.html>)
- Parekh, Bhikhu. *A Commitment to Pluralism*  
(<http://www.powerofculture.nl/uk/archive/commentary/parekh.html>)